

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2029



RENSTRA 2025 - 2029

DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TAPIN

ALAMAT : JL. SPG NOMOR 5 RANTAU 71114
KALIMANTAN SELATAN
NOMOR TELEPON : (0517) 31062
WEBSITE : DPMD.PROFILE.TAPINKAB.GO.ID
E-MAIL : DPMDKABTAPIN@GMAIL.COM



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah merupakan suatu organisasi yang tentunya mempunyai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam setiap tahunnya. Karena meningkatnya pengetahuan masyarakat yang direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan – perubahan, maka pemerintah perlu membuat adanya sebuah perencanaan atau strategi agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Pembentukan rencana kerja jangka pendek, panjang dan menengah merupakan langkah awal yang baik untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Karena, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem kinerja instansi pemerintahan. Kewajiban instansi pemerintah untuk bertanggung jawab dalam keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan adanya dokumen rencana strategis (RENSTRA) perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tapin adalah dokumen perencanaan DPMD untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena, dalam masa lima tahun tersebut DPMD Kabupaten Tapin berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin ini adalah:

1. Menjadi acuan penyusunan Renja DPMD Kab.Tapin
2. Dasar penilaian kinerja Kepala DPMD Kab.Tapin
3. Menjadi acuan penyusunan LAKIP DPMD Kab.Tapin

Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tapin untuk periode 2025-2029 akan menjadi pedoman utama dalam melaksanakan program pemberdayaan dan pembangunan desa. Renstra ini fokus pada penguatan kapasitas kelembagaan desa, peningkatan SDM desa, pengembangan ekonomi lokal, dan optimalisasi dana desa.

Renstra DPMD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap focus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Tapin khususnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka Panjang yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa Kabupaten

Tapin untuk tiga tahun mendatang, dapat bersinergi dengan arah pembangunan Bupati sebagai Kepala Daerah yang terpilih.

Usaha mewujudkan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen RENSTRA ini perlu di dukung dengan strategi umum yang kemudian diterjemahkan kedalam program- program pembangunan kemudian diuraikan ke dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut

Dokumen Renstra dipakai untuk memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara strategis dan berkelanjutan. Rencana Strategis DPMD dapat dikategorikan sebagai dokumen manajerial yang bersifat komprehensif karena mampu memberikan program-program strategi sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). DPMD juga menjabarkan Rencana Strategi Tahun 2025 - 2029 yang memuat tujuan dan sasaran strategis DPMD

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab.Tapin tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045; (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 04);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 09);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 3 Tahun 2025 Lembaran Daerah Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 142 Tanggal 14 Agustus 2025 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tahun 2025 – 2029
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Momor 05 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerrah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03) Tanggal 20 Agustus 2025
26. Peraturan Bupati Tapin Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin;
27. Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025 - 2029

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 – 2029 dimaksudkan agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Rencana strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin

juga di maksudkan sebagai dokumen perencanaan untuk memberikan tujuan dan sasaran strategi arah kebijakan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra–SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin adalah menetapkan program dan kegiatan yang menjadi acuan dan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja yang diemban oleh seluruh aparatur yang dilaksanakan secara terkoordinatif dan terpadu dengan instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha, dan masyarakat agar terwujud keberhasilan kolaboratif secara sinergisitas.

Sedangkan Tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan citra masa depan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin.
- b. Menetapkan tujuan sasaran strategi dan arah kebijakan sebagai landasan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai strategi dan kebijakan
- c. Menetapkan program dan kegiatan prioritas sebagai rencana aksi (action plan) dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2025 – 2029 ini berdasarkan sistematika sebagai berikut :

s	BAB	I	PENDAHULUAN
			1.1. Latar Belakang
			1.2. Dasar Hukum Penyusunan
			1.3. Maksud dan Tujuan
			1.4. Sistematika Penulisan
	BAB	II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMD
			2.2. Sumber Daya DPMD
			2.3. Kinerja Pelayanan DPMD
			2.4. Permasalahan dan Isu Strategis
	BAB	III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
			3.1. Tujuan dan Sasaran
			3.2. Strategi dan Kebijakan
	BAB	IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Tujuan dan sasaran Renstra DPMD
- 4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 4.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, dan Fungsi DPMD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten tapin merupakan salah satu perangkat daerah baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tapin Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang penataan desa, kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan desa, kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
- c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan desa, kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT
- e. pengelolaan kesekretariatan

1. KEPALA

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan koordinator utama dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang bertugas untuk memastikan bahwa semua aktivitas terkait perencanaan pembangunan desa berjalan secara efektif dan efisien.

Kepala Dinas DPMD mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan undang-undang berlaku.

- b. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis
- c. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis ekonomi dan infrastruktur
- d. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis sosial sumber daya manusia
- e. mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah
- f. mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan Perangkat Daerah dan BUMN/BUMD

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan program, umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.

Uraian tugas Sekretariat adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan dinas
- b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset dinas
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyerat
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian
- g. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat
- h. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur pengadaan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan dinas
- i. mengkoordinasikan penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) lingkup dinas
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis (Renstra), Rencana kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Penetapan/Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terintegrasi
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengesahan dokumen anggaran;
- e. menyiapkan bahan dan mengolah laporan realisasi fisik dan keuangan (RFK) dalam rangka melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
- f. menyiapkan bahan dan mengolah laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
- g. menyiapkan bahan dan mengelolaa penatausahaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi;
- h. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan
- i. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan semesteran dan tahunan serta mengevaluasi realisasi anggaran untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian
- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat dan ekspedisi

- d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat
- f. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan tata naskah dinas, uraian tugas, informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja
- g. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan
- h. menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian pegawai serta urusan mutasi lainnya
- i. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian serta kedudukan hukum pegawai
- j. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, bezetting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai
- k. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan distribusi dan koordinasi penghapusan perlengkapan dinas serta fasilitasi lainnya
- m. melaksanakan inventarisasi dan penyiapan barang sesuai manual administrasi barang
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan serta pengelolaan asset
- o. melaksanakan urusan rumah tangga berkenaan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor
- p. menyiapkan bahan evaluasi kinerja individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian
- q. mengumpulkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- r. memfasilitasi kebutuhan teknis dan administratif para pejabat fungsional yang ada dilingkup Dinas Ketahanan Pangan
- s. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Bidang Bina Pemerintahan Desa.

Uraian tugas Bidang Bina Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis administrasi, keuangan, aset desa, pengembangan kapasitas aparatur dan pemerintahan desa
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perumusan Penetapan kebijakan daerah bidang pemerintahan desa dan kelurahan, pengelolaan keuangan dan aset desa, pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dan kelurahan
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
- d. menyusun program, koordinasi, membina, mengatur, mengendalikan, monitoring dan evaluasi serta melaporkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan data base penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan
- f. menyusun program, koordinasi, membina, mengatur, mengendalikan, monitoring dan evaluasi serta melaporkan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan
- g. menyusun program, koordinasi, membina, mengatur, mengendalikan, monitoring dan evaluasi serta melaporkan penyelenggaraan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- h. menyusun program, koordinasi, membina, mengatur, mengendalikan, monitoring dan evaluasi serta melaporkan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset desa
- i. menyusun program, koordinasi, membina, mengatur, mengendalikan, monitoring dan evaluasi serta melaporkan penyelenggaraan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan
- j. memantau mengevaluasi dan menyusun laporan kinerja bidang bina pemerintahan desa.
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

a. Seksi Administrasi, Keuangan dan Aset Desa

Uraian tugas Seksi Administrasi, Keuangan dan Aset Desa adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Administrasi, Keuangan dan Aset Desa
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Administrasi, Keuangan dan Aset Desa
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis

Administrasi, Keuangan dan Aset Desa

- d. menyiapkan bahan Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
 - f. menyiapkan bahan, membina dan mengawasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan
 - h. menyiapkan bahan dan mengelola *Data base* penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - j. menyiapkan bahan, membina, mengawasi serta supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja bidang administrasi, keuangan dan aset desa;
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- b. Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Penataan Desa
- Uraian tugas Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Penataan Desa adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Penataan Desa
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Penataan Desa
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Penataan Desa
 - d. menyiapkan bahan penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
 - e. menyiapkan bahan Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi

penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan

- h. menyiapkan bahan, membina, mengawasi dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD
- k. menyiapkan bahan, membina, mengawasi dan supervise serta fasilitasi BPD
- l. menyiapkan bahan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan
- n. menyiapkan bahan, membina, mengawasi, supervise dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan
- p. membuat pedoman dan petunjuk teknis mekanisme penyusunan peraturan desa (perdes)
- q. menyiapkan bahan, memantau dan mengevaluasi serta menyusun laporan kinerja pengembangan kapasitas aparatur dan penataan desa
- r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Pemberdayaan Kelembagaan dan Kerjasama Desa, dan Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat

Uraian tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberdayaan kelembagaan dan kerjasama desa
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan kapasitas dan partisipasi masyarakat
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan

Fasilitasi kerja sama antar Desa

- f. merencanakan operasional, mengatur, mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan budaya gotong royong serta swadaya masyarakat
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja bidang pemberdayaan masyarakat
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

a. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Kerjasama Desa

Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Kerjasama Desa adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemberdayaan kelembagaan dan kerjasama desa
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pemberdayaan kelembagaan dan kerjasama desa
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemberdayaan kelembagaan dan kerjasama desa
- d. menyiapkan bahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan
- e. menyiapkan bahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat
- f. menyiapkan bahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat
- g. menyiapkan bahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya
- h. menyiapkan bahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- i. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja bidang pemberdayaan kelembagaan dan kerjasama desa
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

b. Seksi Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat

Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Kerjasama Desa adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat

- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat
- d. menyiapkan bahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat
- e. menyiapkan bahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan budaya gotong royong serta swadaya masyarakat
- g. Menyiapkan bahan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan TNI manunggal masuk desa (TMMD) dalam rangka percepatan pembangunan di pedesaan
- h. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan seksi Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat Peningkatan Pokmas Desa
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan kapasitas dan partisipasi masyarakat
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. Bidang Pembangunan Dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna. Uraian tugas Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis pengembangan usaha ekonomi desa dan pembangunan kawasan pedesaan serta teknologi tepat guna
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan usaha ekonomi desa
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembangunan kawasan pedesaan
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan

- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian teknologi tepat guna
- j. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan
- k. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan serta fasilitasi pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan;
- l. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan serta fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan, pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi desa
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

a. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

Uraian tugas Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan usaha ekonomi desa
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengembangan usaha ekonomi desa
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan usaha ekonomi desa
- d. menyiapkan bahan penetapan kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat
- e. menyiapkan bahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin
- f. menyiapkan bahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat
- g. menyiapkan bahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan
- h. menyiapkan bahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat

- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pengembangan usaha ekonomi desa
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

b. Seksi Pembangunan Kawasan Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna

Uraian tugas Seksi Pembangunan Kawasan Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembangunan kawasan pedesaan dan teknologi tepat guna
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembangunan kawasan pedesaan dan teknologi tepat guna
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembangunan kawasan pedesaan dan teknologi tepat guna
- d. menyiapkan bahan penetapan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna
- e. menyiapkan bahan, melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan
- f. menyiapkan bahan, melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan
- g. menyiapkan bahan, melaksanakan koordinasi, fasilitasi, membina, supervisi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kebutuhan dan pemanfaatan teknologi tepat guna
- h. menyiapkan bahan, melaksanakan koordinasi, fasilitasi, membina, supervisi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kinerja pembangunan kawasan pedesaan dan teknologi tepat guna
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DPMD Kabupaten Tapin memiliki 6 (enam) orang yang mengisi Jabatan Fungsional yang terdiri dari 4 (empat) orang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda, 1 (satu) orang Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ahli Muda.

2.1.2 Struktur Organisasi

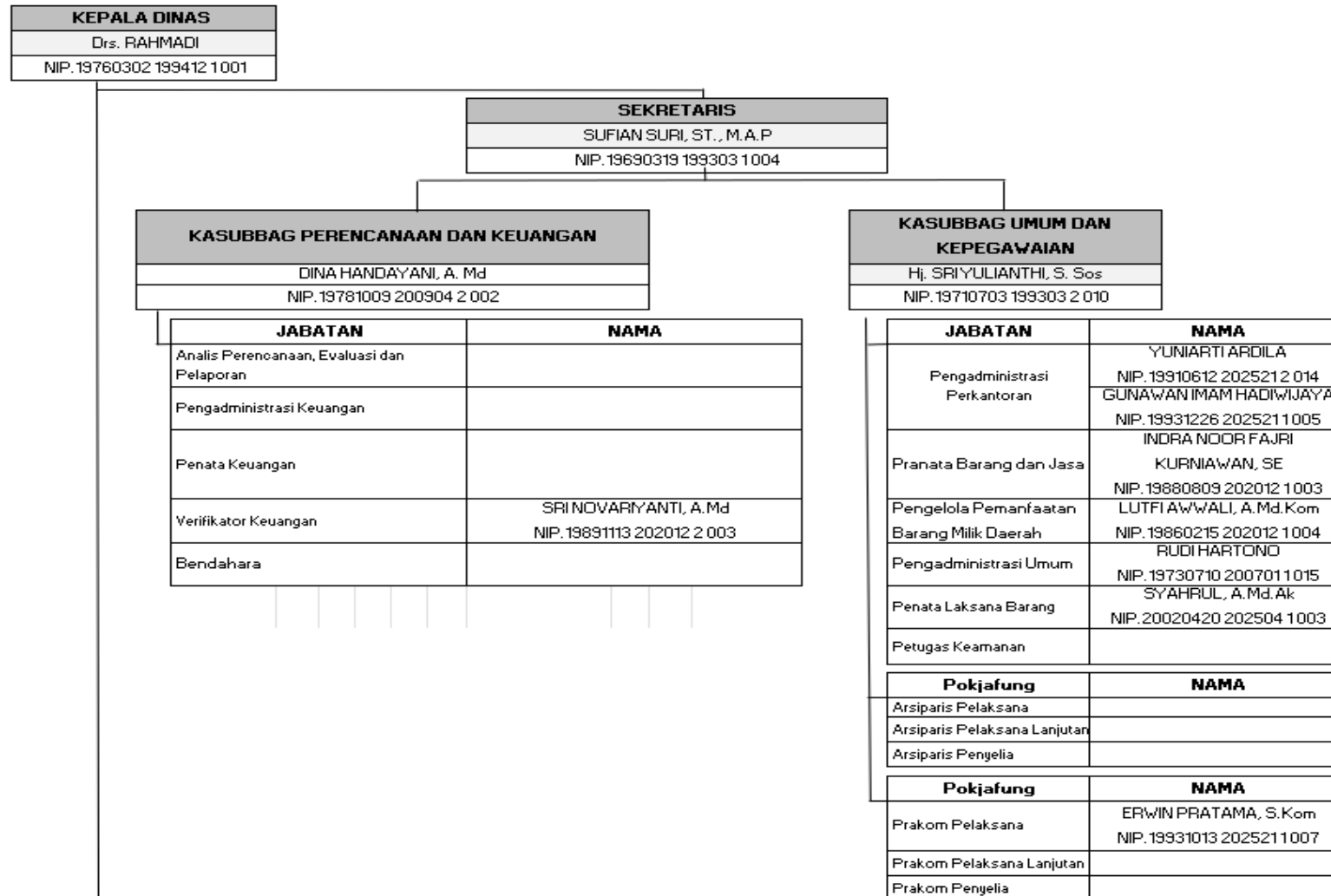
Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tapin terdiri dari:

1. Sekretariat
2. Bidang Bina Pemerintahan Desa.
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
4. Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya Sekretariat membawahi sub bagian dan Kepala Bidang membawahi sub bagian dan jabatan fungsional yang terdiri dari PNS dan PPPK sebagai berikut :

- 1 Sekretariat :
 - 1.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 1.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2 Bidang Bina Pemerintahan Desa.
 - 2.1 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
 - 2.1 Pranata Komputer Ahli Pertama.
- 3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - 3.1 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
- 4 Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
 - 4.1 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
 - 4.2 Penata Layanan Operasional.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TAPIN**



KABID BINA PEMERINTAHAN DESA
TOMY YULIAN ARRIZKY, SE.MM
NIP. 19720717 199903 1007

Jabatan	NAMA
Pengelola Data	
Analisis Desa dan Kelurahan	M. AGIL ANWARI, S.IP NIP. 19940813 202012 1005
	NURUL FAJRIAH, S.IP NIP. 19960326 202012 2 009
Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa	
Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa	
Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan	

Pokjafung	NAMA
Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama	
Penggerak Swadaya Masyarakat Muda	DIDIN MUHTADIN, S.AP NIP. 19730920 199603 1001
Penggerak Swadaya Masyarakat Madya	

KABID PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NORIZATIL HASANAH, S.Sos
NIP. 19700127 198903 2 003

Jabatan	NAMA
Pengelola Data	
Penguluh Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	
Analisis Institusi Masyarakat Pedesaan	
Pengusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat	

Pokjafung	NAMA
Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama	M. MABDIANNOOR, S.Sos NIP. 19960616 2024211005
Penggerak Swadaya Masyarakat Muda	FATHUR RAHMAN, SE NIP. 19841031 2010011012
	ENNY HIDYA, S.Th.I NIP. 19790410 201406 2 007
Penggerak Swadaya Masyarakat Madya	

KABID PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN USAHA
M.E. IWAN SATRIANSYAH, S.Sos
NIP. 19820621 2010011017

Jabatan	NAMA
Pengelola Data	
Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan	HAMBERAN NIP. 19701010 2007011048
	RAMADHANI, S.I.P NIP. 19990115 2022202 1001
Penata Layanan Operasional	Fatimah Noor Wulan, S.AP NIP. 19980211 2025212 003
Analisis Prasarana Perkotaan dan Pedesaan	MULYADI NIP. 19760314 2007011024

Pokjafung	NAMA
Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama	
Penggerak Swadaya Masyarakat Muda	SERLIA NOOR, S.Pi NIP. 19791204 201406 1001
Penggerak Swadaya Masyarakat Madya	
Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertama	MEIRI NADIA, S.T.P NIP. 20010511 202504 2 006
Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Muda	MARISA ANTIRAINI, S.Pi NIP. 19791205 2010012 010
Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Madya	

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sumber daya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin merupakan akumulasi dari berbagai tingkat pendidikan yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, pangkat, golongan kerja dalam rangka menunjang kinerja untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis (Renstra) DPMD Kabupaten Tapin Kabupaten Tapin 2025 - 2029.

Kapasitas pelayanan yang dijalankan oleh DPMD Kabupaten Tapin adalah melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Proses penyelenggaraan pelayanan ini didukung oleh

2.2.1 Sumber daya Manusia

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tapin memiliki pegawai yang berjumlah 23 orang PNS dan 5 orang PPPK dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana tabel berikut ini:

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1	MAGISTER (S-3)	0
2	MAGISTER (S-2)	2
3	SARJANA	14
4	DIPLOMA 4	0
5	DIPLOMA 3	4
6	DIPLOMA 2	0
7	DIPLOMA 1	0
8	SLTA	2
9	SLTP	0
10	SD	1
	JUMLAH	23

Untuk komposisi pangkat (golongan/ruang) pegawai DPMD kabupaten Tapin adalah berikut ini:

NO	Pangkat (gol/ruang)	Ruang	Jumlah
1	Pembina utama	IV/e	0
2	Pembina utama muda	IV/d	0
3	Pembina utama muda	IV/c	1
4	Pembina Tk.1	IV/b	1
5	Pembina	IV/a	3
6	Penata Tk.1	III/d	4
7	Penata	III/c	3

8	Penata muda Tk.1	III/b	3
9	Penata muda	III/a	3
10	Pengatur Tk.1	II/d	2
11	Pengatur	II/c	2
12	Pengatur muda Tk.1	II/b	0
13	Pengatur muda	II/a	1
14	Juru muda	I/d	0
15	Juru	I/c	0
16	Juru muda Tk.1	I/b	0
17	Juru muda	I/a	0
	JUMLAH		23

Untuk komposisi pejabat struktural adalah sebagai berikut:

	TK Eselon	Formasi	Terisi
1	Eselon II.b	1	1
2	Eselon III.a	1	1
3	Eselon III.b	3	3
4	Eselon IV.a	2	2
5	Jabatan fungsional	5	5
6	Staf	15	11
	JUMLAH	27	23

Bedasarkan tabel diatas menjelaskan tentang kualifikasi pendidikan, pangkat atau golongan dan komposisi struktural pegawai DPMD yang mana menunjukan bahwa: pegawai yang berpendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 2 (dua) orang, dan pegawai yang berpendidikan Starata 1 (S1) sebanyak 14 (empat belas) orang. Sementara itu, pegawai yang berpendidikan diploma 3 (D3) sebanyak 4 (empat) orang, dan sisanya yang berpendidikan SLTA dan SD sebanyak 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang.

Dan untuk pangkat/golongan pembina utama muda (IV/c) sebanyak 1 (satu) orang, pembina Tingkat I (IV/b) sebanyak 1 (satu) orang, pembina (IV/a) sebanyak 3 (tiga) orang, penata Tk.I (III/d) sebanyak 4 (empat) orang, penata (III/c) sebanyak 3 (tiga) orang, penata muda TK I (III/b) sebanyak 3 (tiga) orang, penata muda (III/a) sebanyak 3 (tiga) orang, pengatur Tk I (II/d) sebanyak 2 orang, pengatur (II/c) sebanyak 2 (dua) orang, dan pengatur muda (II/a) sebanyak 1 (satu) orang.

Untuk komposisi pejabat struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin disebutkan bahwa Eselon II.b sebanyak (satu) orang, eselon III.a

sebanyak (satu) orang, Eselon III.b sebanyak (tiga) orang, Eselon IV.a sebanyak (dua) orang, dan untuk jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) sebanyak 5 orang PNS.

2.2.2. Aset yang Dikelola

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten Tapin telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut :

- 1) Transportasi roda empat dalam rangka operasional kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Mobil operasional ini digunakan sebagai penunjang kegiatan operasional baik perencanaan, pelaksanaan dan monitoring berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai DPMD Kabupaten Tapin.
- 2) Ruang kerja
SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki kantor tersendiri dimana sekretariat dan bidang memiliki ruang kerja masing-masing.
- 3) Perlengkapan kerja
Dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan kerja telah tersedia pula perlengkapan kerja yang meliputi meja, kursi, lemari, filling cabinet dan lain sebagainya.
- 4) Peralatan Kerja
Untuk mempermudah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi DPMD , saat ini telah tersedia peralatan kerja seperti perangkat komputer, printer, laptop, LCD dan sarana informasi lain seperti televisi.

Tabel 2.1 Sarana Prasarana

Nama Barang	Jumlah	Satuan	Status Barang	Kondisi Barang			KETERANGAN
				B	KB	RB	
1	2	3	4	5	6	7	8
A.C. Split	5	Unit	Digunakan sendiri	4	-	1	
A.C. Window	7	Unit	Digunakan sendiri	4	-	3	
Alat Kesehatan Umum lainnya	3	Buah	Digunakan sendiri	3	-	-	
Alat Rumah Tangga Lain-lain	10	Buah	Digunakan sendiri	10	-	-	
alat ukur lain-lain lainnya (dst)	3	Buah	Digunakan sendiri	3	-	-	
Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Buah	Digunakan sendiri	1	-	-	
Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	Buah	Digunakan sendiri	1	-	-	
Brandkas	1	Buah	Digunakan sendiri	1	-	-	
buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst)	1	Buah	Digunakan sendiri	1	-	-	
CCTV - Camera Control Television System	1	Unit	Digunakan sendiri	1	-	-	
CPU (Peralatan Personal Komputer)	3	Unit	Digunakan sendiri	3	-	-	
Dispenser	5	Buah	Digunakan sendiri		5	-	
External/ Portable Hardisk	1	Unit	Digunakan sendiri	1	-	-	
Facsimile	2	Unit	Digunakan sendiri	1	1	-	

Filing Cabinet Besi	11	Buah	Digunakan sendiri	11	-	-	
Gambar Presiden/Wakil Presiden	2	Buah	Digunakan sendiri	2	-	-	
Handy Cam	2	Unit	Digunakan sendiri	2	-	-	
Handy Talky (HT)	4	Unit	Digunakan sendiri	4	-	-	
Hukum	9	Buah	Digunakan sendiri	9	-	-	
Ilmu Pengetahuan Umum	2	Buah	Digunakan sendiri	2	-	-	
Jalan Desa	15	Buah	Digunakan sendiri	15	-	-	
Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	1	Unit	Digunakan sendiri	1	-	-	
Jembatan Pada Jalan Desa	1	Buah	Digunakan sendiri	1	-	-	
kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	3	Buah	Digunakan sendiri	3	-	-	
Kipas Angin	6	Unit	Digunakan sendiri	1	-	5	
Komputer Unit Lainnya	1	Unit	Digunakan sendiri	1	-	-	
Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	Digunakan sendiri	1	-	-	
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9	Buah	Digunakan sendiri	3	-	6	
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	14	Buah	Digunakan sendiri	8	-	6	
Kursi Lipat	66	Buah	Digunakan sendiri	46	-	20	
Kursi Rapat	9	Buah	Digunakan sendiri	9	-	-	
Kursi Tamu	3	Buah	Digunakan sendiri	3	-	-	
Lap Top	40	Unit	Digunakan sendiri	28	-	-	12 Hibah ke Kecamatan
Layar	2	Unit	Digunakan sendiri	2	-	-	

Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	22	Buah	Digunakan sendiri	20	-	2	
Lemari Es	2	Buah	Digunakan sendiri	2	-	-	
Lemari Kayu	10	Buah	Digunakan sendiri	8	-	2	
Meja Kerja Pegawai Non Struktural	26	Buah	Digunakan sendiri	25	1	-	
Meja Kerja Pejabat Eselon III	6	Buah	Digunakan sendiri	6	-	-	
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	Buah	Digunakan sendiri	6	-	-	
Meja Komputer	4	Buah	Digunakan sendiri	4	-	-	
Meja Rapat	1	Buah	Digunakan sendiri	1	-	-	
Mesin Absensi	1	Unit	Digunakan sendiri	1	-	-	
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Buah	Digunakan sendiri	1	-	-	
Modem	6	Unit	Digunakan sendiri	6	-	-	
Monitor	1	Unit	Digunakan sendiri	1	-	-	
Note Book	3	Unit	Digunakan sendiri	3	-	-	
Overhead Projector	3	Unit	Digunakan sendiri	3	-	-	
P.C Unit	17	Unit	Digunakan sendiri	11	-	6	
Peralatan Jaringan lainnya	2	Unit	Digunakan sendiri	2	-	-	
Peralatan Komputer lainnya	4	Unit	Digunakan sendiri	4	-	-	
Personal Komputer lainnya	8	Unit	Digunakan sendiri	8	-	-	
Printer (Peralatan Personal Komputer)	29	Unit	Digunakan sendiri	23	1	5	
Professional Sound System	1	Buah	Digunakan sendiri	1	-	-	

2.3. Kinerja Pelayanan DPMD Kabupaten Tapin

Jenis dan objek pelayanan yang dilakukan oleh DPMD Kabupaten Tapin adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

2.3.1. Jenis Pelayanan

Kondisi internal dan eksternal DPMD Kabupaten Tapin sangat mendukung sehingga memberikan peluang yang cukup baik bagi segenap jajarannya dalam memberikan pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya

Dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diperlukan berbagai layanan teknis kepada instansi terkait dengan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tapin. Bentuk jenis layanan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Konsultasi/koordinasi antar petugas SKPD mitra kerja dan stakeholders terkait perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan
- b) Konsultasi/koordinasi antar SKPD kabupaten dan kota terkait perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan
- c) Konsultasi/koordinasi antar masyarakat, dunia usaha, dan akademisi peminat data pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kabupaten Tapin
- d) Fasilitasi antar instansi pusat terkait koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan
- e) Pengumpulan data dan informasi pelaksanaan kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan

lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan m pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Tapin.

2.3.2. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran yang menjadi target koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah semua SKPD yang diklasifikasikan menjalankan kegiatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Inilah yang menjadi kerangka kebijakan serta acuan dan pedoman bagi pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Tabel 2.2
Kinerja Pelayanan DPMD

No	Bidang Layanan	Kelompok Sasaran
1	Sekretariat	Lingkungan DPMD Kabupaten Tapin
2	Bidang Bina Pemerintahan Desa	1. pelaksana kegiatan terkait tata kelola pemerintahan desa 2. LSM, organisasi profesi, akademisi, masyarakat umum dan pemangku kepentingan terkait dengan pemerintahan desa di tingkat Kabuapetan Tapin
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. pelaksana kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa 2. LSM, organisasi profesi, akademisi, masyarakat umum dan pemangku kepentingan terkait pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di tingkat Kabupaten Tapin
4	Bidang Pembangunan Dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa	1. pelaksana kegiatan terkait pengembangan ekonomi masyarakat 2. LSM, organisasi profesi, akademisi, masyarakat umum dan pemangku kepentingan terkait pengembangan ekonomi masyarakat di tingkat Kabupaten Tapin

2.3.3. Objek dan Indikator Kinerja Pelayanan

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja
1	SEKRETARIAT	
	a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terlaksananya perencanaan dalam penyusunan program dan rencana kegiatan DPMD
	b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi program dan rencana kegiatan DPMD
	c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan	Terlaksananya penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan DPMD
	d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset dinas	Terlaksananya penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset dinas DPMD
	e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat	Terlaksananya penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat DPMD
	f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian	Terlaksananya penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian
	f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya	Terlaksananya tugas tambahan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya
2	BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA	
	a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pemerintahan desa	Terlaksananya penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pemerintahan desa
	b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan administrasi pemerintahan desa	Terlaksananya penyusunan program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan administrasi pemerintahan desa
	c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kerja sama pemerintahan desa	Terlaksananya penyusunan program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kerja sama pemerintahan desa

	d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan keuangan desa	Terlaksananya penyusunan program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan keuangan desa
	e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan aset desa	Terlaksananya penyusunan program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan aset desa
	f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penataan desa	Terlaksananya penyusunan program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penataan desa
	g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan evaluasi perkembangan desa	Terlaksananya penyusunan program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan evaluasi perkembangan desa
	h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya	Terlaksananya tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya
3	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	a. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan kelembagaan masyarakat	Terlaksananya penyusunan program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan kelembagaan masyarakat
	b. Menyusun program, menkoordinasi, membina,	Terlaksananya penyusunan program, menkoordinasi, membina,
	mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan pelatihan masyarakat	mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan pelatihan masyarakat
	c. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pendataan potensi masyarakat	Terlaksananya penyusunan program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pendataan potensi masyarakat
	d. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan masyarakat dan pelatihan masyarakat serta pendataan potensi masyarakat	Terlaksananya penyusunan program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan masyarakat dan pelatihan masyarakat serta pendataan potensi masyarakat
	BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DESA	

a. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Terlaksananya penyusunan program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat
b. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peningkatan sarana dan prasarana ekonomi perdesaan	b. Terlaksananya penyusunan program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peningkatan sarana dan prasarana ekonomi perdesaan
c. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program usaha ekonomi masyarakat	Terlaksananya penyusunan program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program usaha ekonomi masyarakat
d. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pengembangan usaha ekonomi masy dan peningkatan sarana dan prasarana ekonomi perdesaan	Terlaksananya penyusunan program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pengembangan usaha ekonomi masy dan peningkatan sarana dan prasarana ekonomi perdesaan
e. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam	Terlaksananya penyusunan program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam
f. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna	Terlaksananya penyusunan program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna
g. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program bidang SDA dan TTG	Terlaksananya penyusunan program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program bidang

		SDA dan TTG
	h. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pengembangan dan pemanfaatan SDA dan TTG	Terlaksananya penyusunan program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pengembangan dan pemanfaatan SDA dan TTG

Kinerja pelayanan dapat dilihat pada tingkat capaian berdasarkan sasaran Renstra menurut indikator kinerja pelayanan tahun 2024 - 2026. Data untuk mengisi Tabel Kinerja Pelayanan ini diperoleh dari Penetapan Kinerja DPMD tahun 2023 dan 2024. Berikut tabel ini menampilkan Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMD dan tabel Anggaran serta Realisasi Pendanaan selama tahun 2021-2024

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja DPMD
Pemerintah Kabupaten Tapin

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	75,75	78	77,05	98,78
2	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks profesionalisme ASN (IP- ASN) Perangkat Daerah	-	-	47,1	50	65,91	131,82
3	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa	Persentase Desa Mandiri	-	-	9,52%	20,63%	59,52%	288,51
		Persentase Desa Swasembada	6,349%	13,492%	30,952%	39,68%	32,53%	81,98

Berdasarkan tabel tersebut pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin dijabarkan dalam tiga indikator

kinerja utama yang mendukung satu sasaran strategis DPMD yaitu Meningkatnya Pemberdayaan Desa.

Adapun capaian kinerja DPMD Kabupaten Tapin Tahun 2021-2024 sangat baik karena semua indikator kinerja telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan bahkan beberapa indikator melebihi target kinerja.

Anggaran dan realisasi pendanaan DPMD Kabupaten Tapin yang tertuang pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan DPMD

		2023			2024		
		Anggaran	Realisasi	Rasio	Anggaran	Realisasi	Rasio
1	APBD	65.773.761.790	65.254.880.363,00	97,42%	81.794.327.034	80.520.830.904,00	98,44%

Sumber: Laporan Definitif Tahun 2023 dan 2024 DPMD Kabupaten Tapin

Pada tahun 2023 dan 2024 rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah mencapai lebih dari 90%. Capaian hal ini selaras dengan capaian kinerja DPMD Kabupaten Tapin yang mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.

Berikut merupakan data yang mendukung sasaran strategis DPMD yaitu Meningkatnya Pemberdayaan Desa.

Tabel 2.5
Data IDM
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin

Data IDM	Tahun		
	2022	2023	2024
Mandiri	3	12	75
Maju	97	98	51
Berkembang	26	16	0
Tertinggal	0	0	0
Sangat Tertinggal	0	0	0

Tabel 2.6
Data Bumdes
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin
Tahun 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Berkembangnya Lembaga Ekonomi Desa	Persentase BUMDes yang aktif	74%	78%
		Persentase BUMDes menghasilkan Laba	61%	68%
2.	Memfasilitasi dalam Rangka Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna Dan Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan/Teknologi Tepat Guna (TTG)	Terfasilitasinya Kerjasama dengan Berbagai Pihak dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi	100%	100%

2.3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin

Mencermati hasil analisis gambaran pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin, maka dapat dirumuskan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin ke depan adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Tantangan Organisasi
 - 1. Perubahan paradigma Pemerintah (*Government*) menjadi Tata Pemerintahan (*Governance*), yakni dari hak eksklusif negara untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, civil society dan dunia usaha/swasta;
 - 2 Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan (desa) terpadu pada tahun 1970-an, bergeser menjadi pembangunan masyarakat (desa) pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir 1990-an dan saat ini menjadi pemberdayaan masyarakat dan desa, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan lembaga kemasyarakatan;
 - 3 Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu;
 - 4 Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan

masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar dan daya saingnya;

- 5 Sumber daya alam yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat;
- 6 Sumber daya manusia yang masih terbatas dalam hal menciptakan dan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk mengikuti perkembangan zaman; dan
- 7 Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, melahirkan banyak regulasi yang perlu ditindaklanjuti secara operasional

b. Faktor Peluang Organisasi

1. Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro poor growth);
2. Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki rakyat, dan memberdayakan mengandung pula arti melindungi masyarakat;
- 3 Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- 4 Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang.

Adapun peluang – ancaman yang diidentifikasi oleh DPMD Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

a. Peluang

- Terbitnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur kewajiban pemerintah provinsi dalam pembinaan terhadap desa dan kelurahan
- Koordinasi antara DPMD Kabupaten Tapin dengan pihak – pihak terkait yang berjalan dengan baik
- Dukungan dana dari pemerintah pusat kepada desa
- Kebijakan pemerintah pusat dalam upaya memperkuat desa

b. Ancaman

- Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang belum optimal
- Minimnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
- Kapasitas lembaga perekonomian masyarakat yang masih rendah

- Minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna di kabupaten/ kota
- Minimnya pembinaan terhadap pembangunan sarana prasarana pedesaan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjalankan tugasnya dalam rangka mendukung kinerja utama pemerintah daerah Kabupaten Tapin dengan meningkatkan kualitas kinerja yang profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam proses pengembangan pelayanan DPMD Kabupaten Tapin terdapat beberapa tantangan yang mesti dihadapi antara lain:

1. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang belum optimal
2. Minimnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
3. Kapasitas lembaga perekonomian masyarakat yang masih rendah
4. Pemanfaatan dana desa harus efisien dan efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat
5. Ekonomi desa perlu dikembangkan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia lokal.
6. Minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna di Desa
7. Minimnya pembinaan terhadap pembangunan sarana prasarana perdesaan

Semua potensi yang dimiliki harus dapat dimaksimalkan dan digunakan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan bahwa aktifitas bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin dalam rangka berkontribusi pada pencapaian kinerja utama pemerintah daerah kabupaten Tapin.

2.3.5. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Tapin

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) merupakan agenda pembangunan global baru untuk periode 2016 - 2030 yang meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan

Milenium (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan yang tidak tercapai, terutama untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. SDGs jauh lebih luas daripada MDGs yang meneruskan prioritas-prioritas pembangunan meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan. SDGs menjanjikan masyarakat yang lebih damai dan inklusif. Mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, ditetapkan sarana pelaksanaan (*Means of Implementation*). SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi.

Untuk Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi Kabupaten Tapin dimana Tujuan SDGs DPMD ada pada Tujuan SDGs yang ke 10 yaitu Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antar negara dengan Indikator Programnya adalah Persentase Desa Berstatus Maju dan Swasembada dimana capaian kinerjanya dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan untuk Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Penetapan data SDGs Desa dilakukan melalui musyawarah desa (musdes) setelah dilakukan pendataan desa melalui survei kuisioner. Data yang telah dikumpulkan kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Data SDGs Desa.

Langkah-langkah penetapan data SDGs Desa:

1. **Pendataan:** Desa melakukan survei pendataan desa melalui kuisioner SDGs desa
2. **Musyawarah Desa:** Data SDGs desa wajib ditetapkan dalam forum musyawarah desa (musdes).
3. **Kepala Desa:** Penetapan data SDGs desa ditetapkan dengan SK Kepala Desa tentang Penetapan Data SDGs Desa

Beberapa hal penting dalam melakukan penetapan SDGs Desa adalah sebagai berikut :

- Musdes dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, Ketua BPD, Bhabinkamtibmas, Babinsa, perwakilan Ketua RW, pendamping Desa dan relawan pendata.
- Penetapan SDGs Desa menjadi dasar untuk RKP Desa tahun berikutnya.
- Tujuan pendataan SDGs desa adalah untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, ekonomi tumbuh merata, peduli kesehatan, peduli lingkungan, peduli pendidikan, ramah perempuan, berjejaring, dan tanggap budaya.

Tabel 2.7
Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 - 2023

Indikator Kinerja Utama (IKU)	2022				2023				Tingkat Capaian Target RPJMD Tahun Berjalan dengan Target Akhir Tahun Perencanaan				Target Akhir Periode RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian	Predikat	Target	Realisasi	Capaian	Predikat	Target	Realisasi	Capaian	Predikat	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	-	77,05	75,75	98,31	Sangat Tinggi	78	77,05	98,78	Sangat Tinggi	78
Indeks profesionalisme ASN (IP- ASN) Perangkat Daerah	-	-	-	-	50	47,1	94,20	Sangat Tinggi	50	65,91	131,82	Sangat Tinggi	50
Persentase Desa Mandiri	32,539	76,985	236,59	Sangat Tinggi	8,73	9,52	109,05	Sangat Tinggi	20,63	59,52	288,51	Sangat Tinggi	20,63
Persentase Desa Swasembada	12,698	13,492	106,25	Sangat Tinggi	19,047	30,952	162,50	Sangat Tinggi	39,68	32,53	81,98	Tinggi	39,68

2.4. Permasalahan dan Isu Strategis

2..4.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin dalam perkembangannya, telah menghadapi berbagai dinamika sosial yang tumbuh di masyarakat. Melalui analisis mendalam, penyusunan rencana jangka menengah perlu mempertimbangkan isu maupun permasalahan yang kerap terjadi di wilayah sebagai rujukan dalam menyusun Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin.

Dengan mengetahui permasalahan yang kerap muncul diharapkan semua program dan kegiatan diharapkan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Pemberdayaan masyarakat atau yang biasa disebut empowerment adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitasnya. Sedangkan pemerintahan desa merupakan tonggak pemerintahan di level paling bawah dan langsung berinteraksi dengan masyarakat dimana keberadaannya menjadi sangat penting sehingga perlu pula dilakukan peningkatan kapasitas pemerintahan desa baik lembaga maupun aparturnya. Keberadaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 semakin memperkuat posisi penting pemerintah desa.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025 – 2029 terdapat beberapa permasalahan terkait dengan urusan kinerja pembangunan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu:

- a. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat
- b. Belum optimalnya upaya kemandirian desa melalui kegiatan ekonomi yang produktif

Dalam upayanya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dan pemerintahan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin masih menemui beberapa permasalahan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kurangnya kapasitas aparatur desa

- Kurangnya Pelatihan dan Pengetahuan: Aparatur desa, termasuk kepala desa dan perangkat desa, seringkali kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan desa.
- Keterbatasan SDM: Keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas di bidangnya juga menjadi kendala.
- SDM yang ada mungkin belum memiliki pengetahuan atau keterampilan yang memadai terkait identifikasi, fasilitasi, dan pengembangan LAD, mengingat kekhususan adat

2. Partisipasi Masyarakat

Rendahnya Kesadaran: Masyarakat belum sepenuhnya sadar akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan desa.

3. Anggaran dan Dana:

Keterbatasan Anggaran: Alokasi anggaran untuk pembangunan desa seringkali belum memadai, terutama untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

4. Terbatasnya pengelola Bumdes

Banyak pengelola Bumdes yang belum memiliki pengalaman atau keterampilan manajerial bisnis dan kewirausahaan yang memadai. Kondisi ini seringkali menyebabkan operasional Bumdes berjalan kurang efektif dan efisien. Keterbatasan ini tidak hanya mencakup pemahaman tentang aspek-aspek teknis pengelolaan usaha, tetapi juga kurangnya inovasi dalam pengembangan produk atau layanan, serta kelemahan dalam strategi pemasaran. Akibatnya, Bumdes sulit bersaing di pasar dan mengembangkan potensinya secara maksimal.

5. Bumdes beroperasi tanpa perencanaan bisnis yang matang.

Studi Kelayakan yang dilakukan masih cenderung sederhana, bahkan tidak jarang Bumdes didirikan tanpa analisis pasar yang mendalam atau keadaan keuangan yang realistis. Kurangnya perencanaan bisnis ini membuat Bumdes rentan terhadap kegagalan. Bumdes kesulitan dalam mengidentifikasi peluang, mengelola resiko, dan membuat keputusan yang tepat. Hal ini berujung pada pemborosan sumber daya

dan pencapaian tujuan yang tidak optimal, bahkan bisa menyebabkan kerugian.

6. Belum adanya Data dan Pemetaan LAD yang akurat

Karena program belum berjalan optimal maka belum ada data yang komprehensif mengenai keberadaan, karakteristik dan potensi LAD yang ada di Kabupaten Tapin, ini menghambat perencanaan dan pelaksanaan program

7. Rendahnya Urgensi Pelaksanaan Program LAD

- Sedikitnya populasi masyarakat adat: Angka masyarakat adat yang relatif kecil di Kabupaten Tapin dapat menyebabkan program LAD tidak menjadi prioritas utama dibandingkan program pemberdayaan masyarakat lain yang menyentuh populasi lebih luas
- Kurangnya pemahaman tentang peran LAD: Baik di tingkat dinas maupun masyarakat umum, mungkin belum ada pemahaman yang kuat tentang mengapa LAD penting dan bagaimana peran mereka dapat berkontribusi pada pembangunan desa secara keseluruhan, meskipun populasi masyarakat adat sedikit

2.4.2. Penentuan Isu - Isu Strategis

Globalisasi, dengan kemajuan teknologi dan informasi yang dibawanya, telah menciptakan peluang baru bagi masyarakat desa. Namun, hal itu juga membawa sejumlah tantangan yang harus kita navigasikan dengan hati-hati. Kita juga perlu bekerja sama untuk mengatasi rintangan ini agar kita dapat membangun desa yang lebih kuat dan makmur bagi generasi mendatang

Berikut merupakan isu strategis periode 2025-2029 yang menjadi tantangan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin

1. Kesenjangan Digital

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat desa adalah kesenjangan digital. Kurangnya akses ke internet dan teknologi modern dapat menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Untuk mengatasi kesenjangan ini, kita perlu berinvestasi dalam infrastruktur telekomunikasi dan meningkatkan literasi digital di antara warga kita. Dengan menghubungkan desa kita ke dunia, kita dapat membuka pintu bagi peluang baru dan memberdayakan masyarakat kita untuk bersaing di pasar global.

2. Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan dan pengangguran tetap menjadi masalah utama di pedesaan. Globalisasi telah menyebabkan hilangnya pekerjaan tradisional, membuat banyak orang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu mengembangkan strategi untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung usaha kecil dan menengah. Selain itu, kita harus berinvestasi

dalam pendidikan dan pelatihan kejuruan untuk meningkatkan keterampilan warga kita dan membuat mereka dapat dipekerjakan

3. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Kurangnya partisipasi masyarakat merupakan tantangan lain yang menghambat pemberdayaan masyarakat desa. Penting untuk melibatkan warga kita dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Kita harus menciptakan ruang dan mekanisme bagi orang untuk berpartisipasi dan menyuarakan pendapat mereka. Dengan melibatkan warga negara dalam proses pembangunan, kita dapat memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka diperhatikan

4. Persoalan Lingkungan

Globalisasi juga membawa tantangan lingkungan baru bagi masyarakat desa. Peningkatan aktivitas ekonomi dan konsumsi dapat menyebabkan polusi, degradasi tanah, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Kita harus mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan, melindungi sumber daya alam kita, dan mendidik masyarakat kita tentang pentingnya menjaga lingkungan kita.

5. Optimalisasi Peran dan Fungsi Lembaga Adat Desa dalam Pembangunan Daerah di Tengah Keterbatasan Sumber Daya dan Kondisi Masyarakat Adat yang terbatas.

Isu ini mencakup bagaimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat secara efektif mengidentifikasi, memfasilitasi, dan memberdayakan LAD meskipun menghadapi kendala SDM dan populasi masyarakat adat yang tidak banyak, serta bagaimana LAD dapat berkontribusi pada pembangunan daerah secara keseluruhan.

Selain isu strategis diatas, dalam hal peningkatan status desa dimana berdasarkan surat dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025 – 2045 maka untuk penyusunan Renstra DPMD Tahun 2025 – 2029 untuk indikator kinerja Indeks Desa Membangun (IDM) mulai Tahun 2025 sudah menggunakan Indeks Desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa. Dalam Indeks Desa, desa dikelompokkan menjadi 5 klasifikasi status (*status sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan mandiri*). Apabila di tahun 2045 target Desa Mandiri yang ditetapkan relatif kecil, ada kecenderungan bahwa target di status lainnya seperti Desa Maju dan Desa Berkembang yang lebih besar. Selain itu, penetapan target di tahun 2045 mempertimbangkan beberapa hal antara lain (a) Karakteristik dan tema pembangunan wilayah; (b) kondisi daerah di tahun *baseline*; (c) kemampuan daerah

Indeks Desa menjadi indikator kinerja pembangunan desa yang universal, sejalan dengan implementasi pemerataan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 yang mengamanatkan penyelesaian ketimpangan untuk mencapai salah satu Visi Indonesia Emas 2045, yakni kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang. Di 2023, BPS mencatat kemiskinan perdesaan mencapai 12,22 persen, di atas kemiskinan perkotaan yakni sebesar 7,29 persen. Untuk itu, mewujudkan pembangunan yang merata tidak hanya menargetkan pengurangan ketimpangan antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, tetapi juga menekan ketimpangan antara perkotaan dan perdesaan. “Pembangunan desa dalam Indonesia Emas 2045 dititikberatkan pada pengarusutamaan pembangunan desa yang bersifat lintas sektor dan lintas aktor, menuju kemandirian desa.

Isu-isu strategis ini akan menjadi fokus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Tapin Tahun 2025 – 2029.

Tabel 2.8
Isu Strategis
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tapin

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan Daerah	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	1. Stunting 2. Kurangnya Kapasitas Aparatur Desa 3. Partisipasi Masyarakat 4. Terbatasnya Pengelola Bumdes 5. Bumdes beroperasi tanpa perencanaan bisnis yang matang 6. Belum adanya Data dan Pemetaan LAD yang akurat 7. Rendahnya Urgensi Pelaksanaan Program LAD	Isu stunting merupakan masalah global, regional, dan nasional yang signifikan, terutama terkait dengan kesehatan anak-anak dan pertumbuhan mereka. Stunting, atau kekurangan gizi kronis pada anak-anak, memiliki dampak jangka panjang pada kualitas hidup dan produktivitas individu dan negara secara keseluruhan Posyandu, sebagai garda terdepan pelayanan publik, kini bertransformasi untuk menerapkan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencakup kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan, sosial, serta ketentraman dan ketertiban umum. Isu global, regional, dan	Stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat global, dengan prevalensi tinggi di negara-negara berkembang Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) menuntut adanya integrasi berbagai sektor untuk mencapai tujuan pembangunan. Penerapan 6 SPM di Posyandu sejalan dengan prinsip ini, karena melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat	Stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga pada perkembangan kognitif dan kesehatan jangka panjang Isu regional seringkali menyoroti kesenjangan pembangunan antar daerah, termasuk dalam hal akses terhadap pelayanan dasar. Penerapan 6 SPM di Posyandu diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ini dengan memastikan setiap daerah memiliki	Indonesia termasuk dalam Regional Asia Tenggara dengan prevalensi stunting yang tinggi Pemerintah Indonesia memiliki fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Penerapan 6 SPM di Posyandu sejalan dengan upaya ini, karena Posyandu berperan dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan	• Kurangnya kompetensi aparatur desa dalam berbagai bidang, • Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat, dan • Kurangnya pemahaman akan kewenangan desa serta regulasi • Kurangnya partisipasi masyarakat merupakan tantangan lain yang menghambat pemberdayaan masyarakat desa • Kurangnya SDM kompeten, • Lemahnya kelembagaan, dan • Kurangnya akses terhadap informasi dan pendampingan • Rendahnya partisipasi masyarakat, • Kurangnya pemahaman perangkat desa tentang pengelolaan BUMDes, dan • Masalah kepemimpinan serta manajemen • Keterbatasan SDM, modal usaha, dan dukungan pemerintah • Optimalisasi Peran dan Fungsi Lembaga Adat Desa dalam Pembangunan Daerah di Tengah Keterbatasan Sumber Daya dan Kondisi Masyarakat Adat yang terbatas.

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan Daerah	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
		nasional terkait 6 SPM ini berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan yang lebih terintegrasi dan komprehensif		akses yang sama terhadap pelayanan dasar yang berkualitas	pendidikan anak-anak serta masyarakat secara umum.	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI

DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai visi misi pembangunan daerah yang aspiratif dan berorientasi pada masa depan untuk mewujudkan Kabupaten Tapin yang Maju dan Beriman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin memastikan bahwa tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan telah selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran serta program prioritas pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029. Adapun Visi yang ingin dicapai dalam periode 2025-2029 adalah:

“TERWUJUDNYA TAPIN MAJU DAN BERIMAN (BERINTEGRITAS, SEJAHTERA, INOVATIF, AGAMIS, DAN BERKELANJUTAN)”

Dengan memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 ditetapkan lima misi Pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan Berakhlak Mulia, Sehat Jasmani dan Rohani, Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Mampu Menguasai Teknologi dan Informasi;
2. Meningkatkan Kemandirian Pengelolaan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pariwisata, dan Industri Kreatif;
3. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Pengembangan Wilayah dengan Memperhatikan Pemanfaatan Ruang;
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Responsif terhadap Ketahanan Bencana;
5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat.

Berdasarkan lima misi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin merupakan bagian dari misi ke satu dan dua dengan sasaran daerah pada menurunnya kemiskinan dan ketimpangan dan misi ke lima dengan sasaran daerah meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Kemudian berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis, dan tinjauan faktor

internal serta eksternal, maka ditetapkan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin dalam rangka mendukung Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selaras dengan tujuan dan sasaran dalam RPJMD 2025-2029. Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada 5 (lima) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) DPMD Kabupaten Tapin Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029. Tujuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin maka ditetapkanlah sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang akan dilayani dan profil pelayanan setiap perangkat daerah.

Hal penting yang perlu diperhatikan bahwa sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level OPD (Eselon II) yang akan dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sedangkan indikator kinerja sasaran digunakan untuk *medium term outcome* atau *outcome* jangka menengah. Adapun sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah.
3. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	<i>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah</i>		<i>Nilai SAKIP</i>	71	72,95	74,90	76,85	78,80	80,75	82,70	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	77,05	80,05	81,00	81,50	82,00	82,50	83,00	
		Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	<i>Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah</i>	65,91	80	80,50	81,00	81,50	82,00	82,50	
Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan	<i>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>		<i>Indeks Desa</i>	-	490,00	493,20	496,40	499,60	502,80	506,00	
		Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa	<i>Persentase Desa Mandiri</i>	59,52	38,09	41,27	44,44	47,62	50,79	53,97	

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang penting dalam mencapai efisiensi dan efektivitas pemerintahan. SAKIP mengukur seberapa baik perangkat daerah dalam merencanakan, mengukur, melapor, dan mengevaluasi kinerjanya. Nilai SAKIP yang baik menunjukkan bahwa perangkat daerah telah berhasil mengimplementasikan SAKIP dengan baik dan mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan

Evaluasi AKIP merupakan aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai SAKIP merupakan total dari komponen penilaian AKIP yang terdiri dari perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%) , dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%).

2. Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah alat ukur statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin dalam melaksanakan tugas. Narasi tentang IP ASN menyoroti pentingnya peningkatan kualitas ASN sebagai fondasi pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel.

IP ASN merupakan ukuran kuantitatif yang mencerminkan tingkat profesionalisme ASN, yang dinilai berdasarkan empat dimensi utama:

- Kualifikasi: Tingkat pendidikan dan pengalaman kerja ASN.
- Kompetensi: Kemampuan dan keterampilan ASN yang relevan dengan tugasnya.
- Kinerja: Pencapaian ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Disiplin: Keakuran dan kepatuhan ASN terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.

3. Persentase Desa Mandiri

Desa Mandiri adalah desa yang memiliki tingkat kemandirian tinggi dan sistem pemerintahan yang baik. Desa mandiri mampu mengelola sumber daya dan keuangannya secara optimal dan berkelanjutan. Indeks Desa digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan desa, membantu merumuskan kebijakan pembangunan, dan menentukan target prioritas pembangunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, Metode

perhitungan Desa Mandiri mulai tahun 2025 berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana sampai tahun 2024 masih menggunakan metode perhitungan Indeks Desa Membangun (IDM) sedangkan mulai tahun 2025 untuk perhitungan Desa mandiri berdasarkan Indeks Desa. Desa Mandiri adalah desa yang memiliki tingkat kemandirian tinggi dan sistem pemerintahan yang baik. Desa mandiri mampu mengelola sumber daya dan keuangannya secara optimal dan berkelanjutan. Indeks Desa digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan desa, membantu merumuskan kebijakan pembangunan, dan menentukan target prioritas pembangunan

Indeks Desa adalah sebuah instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi perkembangan dan kemandirian desa di Indonesia. Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai berbagai aspek pembangunan desa, mulai dari layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, hingga tata kelola pemerintahan desa. Dengan menggunakan Indeks Desa, pemerintah dapat mengidentifikasi status perkembangan desa, menetapkan prioritas pembangunan, dan mengarahkan kebijakan yang tepat sasaran.

Indeks Desa (ID) disusun dengan landasan bahwa peningkatan kemandirian desa yang berkelanjutan merupakan proses akumulasi dari *dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas dan dimensi tata kelola pemerintahan Desa*. Keenam Dimensi menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pembangunan Desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan yang mengedepankan pembangunan manusia didasarkan pada ruang dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas dan dimensi tata kelola pemerintahan Desa. Dalam penyusunan ID 6 dimensi dibentuk oleh sejumlah 13 Sub Dimensi dan 48 indikator.

1. **Aspek dimensi layanan dasar** terdiri sub dimensi pendidikan, sub dimensi kesehatan, dan sub dimensi utilitas dasar dengan 13 indikator;
2. **Aspek dimensi sosial** terdiri sub dimensi aktivitas dan sub dimensi fasilitas Masyarakat dengan 8 indikator;
3. **Aspek dimensi ekonomi** terdiri dari sub dimensi produksi desa dan sub dimensi fasilitas pendukung ekonomi dengan 12 indikator;
4. **Aspek dimensi lingkungan** terdiri dari sub dimensi pengelolaan lingkungan dan sub dimensi penanggulangan bencana dengan 5 indikator;

5. **Aspek dimensi aksesibilitas** terdiri dari sub dimensi kondisi akses jalan dan sub dimensi kemudahan akses dengan 5 indikator;
6. **Aspek tata kelola pemerintahan desa** terdiri dari sub dimensi kelembagaan dan pelayanan desa dan sub dimensi tata kelola keuangan desa dengan 5 indikator.

Pengumpulan data dilakukan melalui survei desa sebanyak jumlah desa hasil penetapan dari Kementerian Dalam Negeri, yang kemudian diolah untuk menghitung nilai dari setiap dimensi, sub dimensi dan indikator. ID dihitung dengan menggunakan metode kuantitatif, di mana setiap indikator pembentuk Sub Dimensi serta Dimensi diberi bobot tertentu berdasarkan tingkat kepentingan kewenangan desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Hasil akhirnya adalah penetapan status kemajuan dan kemandirian desa serta memberikan rekomendasi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, atau pemerintah desa.

1. Perhitungan Indeks Dimensi

Seperti diketahui bahwa 48 indikator yang digunakan dalam penentuan kemajuan dan kemandirian desa mempunyai nilai dengan ukuran yang berbeda-beda, diantaranya adalah persentase, km, rupiah, dan tahun.

Terkait dengan nilai indikator yang mempunyai ukuran berbeda, maka nilai-nilai indikator tersebut tidak bisa digabung (dijumlahkan atau dikurangkan). Agar nilai-nilai indikator tersebut dapat dijumlahkan atau dikurangkan maka perlu dilakukan suatu standarisasi nilai indikator.

ID merupakan indeks dimensi yang dihasilkan dari total indeks Dimensi Layanan Dasar, total indeks Dimensi Sosial, total indeks Dimensi Ekonomi, total indeks Dimensi lingkungan, total indeks Dimensi aksesibilitas, dan total indeks Dimensi tata kelola pemerintah Desa setiap Desa.

Formulasi Indeks Desa (ID)

$$\begin{aligned}
 &= DLD + DS + DE + DL + DA + DTPD \\
 &= 26,77\% + 13,39\% + 25,20\% + 14,17\% + 7,87\% + 12,60\% \\
 &= 100,00\%
 \end{aligned}$$

Keterangan:

- ID = Indeks Desa
- DLD = Dimensi Layanan Dasar
- DS = Dimensi Sosial
- DE = Dimensi Ekonomi
- DL = Dimensi Lingkungan

DA = Dimensi Akseabilitas
DTPD = Dimensi Tata Kelola Pemerintah Desa

2. **Perhitungan Skor Indikator**

Setiap dimensi dibangun dari serangkaian Sub Dimensi, dan setiap Sub Dimensi diturunkan ke dalam perangkat indikator. Sebelum melakukan penghitungan Dimensi dan Indeks Desa, dilakukan scoring pada setiap indikator. Setiap indikator dapat terdiri dari satu pertanyaan maupun lebih. Setiap indikator mempunyai skor yang sudah seragam, yaitu 1 – 5. Total skor Indeks Desa adalah berjumlah 635 (enam ratus tiga puluh lima) dan nilai indeks 100,00% (seratus persen), dengan penghitungan scoring setiap indikator ditentukan sebagai berikut:

Setiap dimensi dibangun dari serangkaian Sub Dimensi diturunkan ke dalam perangkat indikator. Setiap indikator memiliki skor 1 s.d. 5, semakin tinggi skor semakin memiliki makna yang positif. Total Skor Indikator ditransformasikan ke dalam indeks dengan nilai 1.

$$Y = \frac{\text{Total Skor X}}{\text{Nilai Maksimum Skor Indeks Desa}}$$

Keterangan:

Y = Komponen Indeks yang terdiri dari Indeks Dimensi Layanan dasar, total indeks Dimensi Sosial, total indeks Dimensi Ekonomi, total indeks Dimensi lingkungan, total indeks Dimensi akseabilitas, dan total indeks Dimensi tata kelola pemerintahan Desa

X = Indikator (X)

Tabel 3.2
Definisi Operasional dari Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin
Tahun 2025 – 2029

N o	Tujuan	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	<i>Nilai SAKIP</i>	Nilai SAKIP adalah pengukuran kinerja instansi pemerintah yang terstruktur dan terukur berdasarkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	<i>Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah</i>	LHE Kemenpan RB
	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Sumber Data
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	Nilai yang mencerminkan tingkat akuntabilitas kinerja suatu perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang diukur melalui berbagai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam SAKIP	<i>Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</i>	LHE Inspektorat
	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	<i>Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah</i>	Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.	<i>Kompilasi nilai dari masing-masing unsur yang ada pada aplikasi IP-ASN</i>	IP – ASN (Padaringan) BKPSDM
	Tujuan	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Sumber Data
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	<i>Indeks Desa</i>	Indeks Desa adalah indikator tunggal yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa di seluruh Indonesia	<i>Formulasi Indeks Desa (ID)</i> $= DLD + DS + DE + DL + DA + DTPD$ $= 26,77\% + 13,39\% + 25,20\% + 14,17\% + 7,87\% + 12,60\%$ $= 100\%$	Berita Acara Indeks Desa
	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Sumber Data
	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa	<i>Persentase Desa Mandiri</i>	Indeks Desa adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa, yang dirancang untuk menjadi indikator tunggal dalam pembangunan desa. Indeks ini menggabungkan berbagai data terkait pembangunan desa, seperti aksesibilitas, layanan dasar, ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan desa	$\frac{\text{Jumlah Desa Berstatus Mandiri}}{\text{Jumlah Seluruh Desa}} \times 100\%$	Pemutakhiran Data Indeks Desa

3.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam mendukung pencapaian Rencana Strategis DPMD Kabupaten Tapin 2025-2029 dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan kebijakan DPMD dalam keterkaitannya dengan Tujuan Rencana Strategis (Renstra) DPMD Kabupaten Tapin 2025-2029 yaitu pada Tujuan ketiga meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dimana sasarannya adalah meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan strategi yang diambil adalah peningkatan kualitas perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Strategi digambarkan dalam pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Berikut merupakan tabel keterkaitan antara Tujuan, sasaran dan strategi Pembangunan Daerah dengan Tujuan sasaran DPMD beserta strategi dan arah kebijakan yang diambil oleh DPMD Kabupaten Tapin untuk Tahun 2025 – 2029

Tabel 3.3
Penahapan Renstra
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
• Penguatan kapasitas sumber daya dan Motivasi pengelola BUMDes dan berjiwa kewirausahaan	• Penataan Tata Kelola BUMDes Menjadi Pengelola BUMDes yang Profesional, Memiliki aturan yang efektif, memiliki kinerja yang terukur, dan pelayanan yang berbasis digital	• Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Dasar Berbasis Kompetensi lebih mudah dipahami	• Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam (SDA) Unggulan sesuai potensi dan Produk Unggulan di Desa	• Perwujudan BUMDes yang berintegritas, Sejahtera, Inovatif, Maju, dan Berkelanjutan
Strategi I : Peningkatan kualitas SDM pengelola BUMDes yang cerdas, kompeten, dan mampu menguasai keterampilan manajerial bisnis kewirausahaan	Strategi I : Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola BUMDes yang cerdas, kompeten, dan mampu menguasai manajemen operasional dan keuangan.	Strategi I : Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola BUMDes yang cerdas, kompeten, dan mampu menguasai strategi pengembangan usaha dan pemasaran	Strategi I : Melakukan penguatan lembaga ekonomi pedesaan melalui bantuan permodalan, pengembangan potensi desa, serta kerjasama ekonomi berbasis kawasan	Strategi I : Penguatan kondisi sosial budaya masyarakat yang mudah menyesuaikan diri terhadap perkembangan bisnis dan memiliki semangat kewirausahaan
Strategi II : Pemenuhan dan Pemerataan Apresiasi serta Penghargaan terhadap Pengelola BUMDes	Strategi II : Pemenuhan dan Pemerataan Apresiasi serta Penghargaan terhadap Pengelola BUMDes	Strategi II : Pemenuhan dan Pemerataan Apresiasi serta Penghargaan terhadap Pengelola BUMDes	Strategi II : Penguatan modal usaha dan manajerial serta profesionalisme Pengelola BUMDes	Strategi II : Memperkuat kelembagaan BUMDES sebagai holding company di pedesaan
Strategi III : Peningkatan upaya anggaran kesejahteraan terhadap pengelola BUMDes	Strategi III : Pemenuhan dan Pemerataan Apresiasi serta Penghargaan terhadap Pengelola BUMDes	Strategi III : Pemenuhan dan Pemerataan Apresiasi serta Penghargaan terhadap Pengelola BUMDes	Strategi III : Peningkatan dan Penguatan modal usaha dan manajerial serta profesionalisme Pengelola BUMDes	Strategi III : Peningkatan dan Memperkuat kelembagaan BUMDES sebagai holding company di pedesaan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
• Penguatan Kapasitas dan Motivasi Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM)	• Pemetaan dan Penguatan Basis Data Masyarakat Adat	• Peningkatan Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat tentang Pentingnya Lembaga Adat Desa (LAD)	• Pengembangan Kemitraan dan Jaringan Kerja Sama Lintas Sektor untuk mendukung program LAD	• Penguatan Regulasi Lokal untuk mendukung keberadaan dan peran LAD
<u>Strategi I :</u> Mengadakan pelatihan intensif bagi SDM Bidang Pemberdayaan Masyarakat tentang identifikasi masyarakat adat,fasilitasi pembentukan/ penguatan LAD, penyusunan program LAD, dan pemahaman hukum adat.	<u>Strategi I :</u> Melakukan survei dan pemetaan partisipatif untuk mengidentifikasi potensi komunitas masyarakat adat di Kabupaten Tapin, bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan akademisi.	<u>Strategi I :</u> Mengadakan kegiatan sosialisasi dan edukasi secara masif tentang pentingnya dan peran nilai-nilai adat dalam pembangunan desa, dengan menyasar masyarakat umum dan tokoh adat.	<u>Strategi I :</u> Menjalin kerja sama dengan lembaga lain seperti Dinas Kebudayaan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh adat untuk mendukung program LAD.	<u>Strategi I :</u> Menginisiasi perumusan Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah yang komprehensif untuk pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan Lembaga Adat Desa.
<u>Strategi II :</u> Mengembangkan pedoman operasional standar (SOP) untuk proses identifikasi, pembentukan, dan pembinaan LAD.	<u>Strategi II :</u> Membuat basis data terpadu mengenai masyarakat adat dan potensi LAD, termasuk profil, sebaran, dan kebutuhan mereka.	<u>Strategi II :</u> Memberikan pendampingan yang intensif bagi komunitas yang memiliki potensi untuk membentuk LAD, memastikan prosesnya inklusif dan sesuai dengan norma adat setempat.	<u>Strategi II :</u> Melakukan studi banding ke daerah lain yang berhasil mengembangkan program LAD untuk pembelajaran dan adopsi praktik terbaik.	<u>Strategi II :</u> Mengupayakan alokasi anggaran memadai dan berkelanjutan untuk program LAD.

Dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi perdesaan dan memperkuat kemandirian desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkomitmen untuk melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas secara menyeluruh kepada pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan aparat Pemerintah Desa. Fasilitasi ini dibuat untuk meningkatkan kemampuan sumber daya yang ada di tingkat desa, mencakup aspek manajerial, operasional, hingga strategi pengembangan usaha.

Program peningkatan kapasitas ini tidak bersifat parsial, melainkan merupakan pembinaan terpadu dan berkelanjutan. Artinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak hanya memberikan pelatihan sementara, tetapi juga mendampingi secara berkelanjutan melalui berbagai metode seperti lokakarya, bimbingan teknis, serta konsultasi individual. Pembinaan ini difokuskan pada penguatan pemahaman aparat Pemerintah Desa mengenai aturan dan kebijakan terkait BUMDes, serta pengembangan keahlian para pengelola BUMDes dalam mengelola unit usaha, menyusun laporan keuangan, mengembangkan produk dan layanan inovatif, hingga menjalin kemitraan dengan pihak ketiga. Tujuannya adalah memastikan bahwa desa memiliki pengelola yang memadai untuk mengelola aset dan potensi ekonominya secara efektif, sehingga BUMDes dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat semakin memperkuat pentingnya pembinaan terhadap desa dan kelurahan yang ada di Indonesia. Hal ini tercermin dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan desa sebagai bagian dari Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa
 - Melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas kepada pengelola Bumdesa dan aparat pemerintah desa dalam peningkatan kemampuan sumber daya yang ada
 - Pembinaan terpadu dan berkelanjutan pada aparat pemerintah desa dan pengelola Bumdesa
 - Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna Perdesaan
2. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa.
 - Mengembangkan kapasitas dan pendampingan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat secara berkelanjutan
 - Menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan
 - Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, lingkungan keamanan dan politik;

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring, pembangunan desa
2. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan
 - Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan
 3. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota
 - Mengembangkan kerjasama antar desa, antardaerah, dan antar pemerintah swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa, khususnya di luar Jawa-Bali
 4. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan
 5. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam
 - Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa
 - Pengelolaan aset dan keuangan desa
 - Penyiapan peta desa dan penetapan batas desa secara digital
 - Reformasi pelayanan publik termasuk pelayanan di luar jam kantor oleh desa, kelurahan, dan kecamatan
 - Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pemerintahan desa;
 - Mengembangkan kerjasama antar desa
 - Melaksanakan penataan desa
 - Mengembangkan pusat informasi desa/balai rakyat
 6. Pengawasan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan
 - Memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU desa sejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat UU desa, termasuk penyusunan PP sistem keuangan desa
 - Memastikan distribusi dana desa dan alokasi dana desa berjalan secara efektif, berjenjang, dan bertahap
 - Mempersiapkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat.
 7. Program pembinaan kader Posyandu untuk pencegahan stunting di

Tapin, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader, serta memperkuat peran Posyandu dalam deteksi dini dan penanganan stunting. Hal ini penting karena kader Posyandu adalah garda terdepan dalam pemantauan pertumbuhan anak dan penyuluhan gizi kepada masyarakat

Program pembinaan tersebut terdiri dari :

- Pelatihan
- Pembinaan
- Peran Posyandu
- Evaluasi

Dengan adanya arah kebijakan dan isu strategis ini, pemerintah pusat mengharapkan masyarakat yang berdaya dan pemerintahan desa yang kuat menjadi salah satu solusi penanggulangan kemiskinan yang saat ini juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tapin.

**Tabel 3.4 Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029**

No	Operasionali sasi NSPK	Arah Kebijakan Renstra DPMD	Arah Kebijakan RPJMD	K e t
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	—	• Peningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat desa • Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur Desa melalui sosialisasi dan Bimbingan Teknis	• Peningkatkan kapasitas dan kesejahteraan pegawai (ASN & Non ASN) maupun tenaga kemasyarakatan	
2	—	• Penguatan kapasitas sumber daya dan Motivasi pengelola BUMDes dan berjiwa Kewirausahaan • Perwujudan BUMDes yang berintegritas, Sejahtera, Inovatif, Maju, dan Berkelanjutan • Penguatan Regulasi Lokal untuk mendukung keberadaan	• Menurunnya Kemiskinan dan Ketimpangan	

		dan peran LAD		
--	--	------------------	--	--

Dalam upayanya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dan pemerintahan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin masih menemui beberapa kendala yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pelayanan administrasi dan koordinasi pada DPMD masih belum maksimal
2. Kurang optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa
3. Belum berperannya lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
4. Minimnya aparatur pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan desa yang terampil
5. Penguatan kapasitas lembaga perekonomian masyarakat desa yang belum maksimal,
6. Minimnya anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan

Tabel 3.5
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						K e t
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Misi : • Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Cerdas dan Berakhlak Mulia, Sehat Jasmani dan Rohani, Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Mampu Menguasai Teknologi dan	<i>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah</i>		<i>Nilai Sakip</i>	<i>72,95</i>	<i>74,90</i>	<i>76,85</i>	<i>78,80</i>	<i>80,75</i>	<i>82,70</i>	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	80,05	81,00	81,50	82,00	82,50	83,00	
		Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	<i>Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah</i>	80	80,50	81,00	81,50	82,00	82,50	
	<i>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>		<i>Indeks Desa</i>	<i>490,00</i>	<i>493,20</i>	<i>496,40</i>	<i>499,60</i>	<i>502,80</i>	<i>506,00</i>	

Informasi • Meningkatkan Kemandirian Pengelolaan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pariwisata dan Industri Kreatif • Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat		Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa	<i>Persentase Desa Mandiri</i>	38,09	41,27	44,44	47,62	50,79	53,97	
---	--	---	---------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Dalam upaya mencapai sasaran dan strategi arah kebijakan Renstra, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin tahun 2025 - 2029 melakukan langkah pertamanya ke dalam bentuk program perencanaan, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang ada.

Penyajian program, kegiatan dan sub kegiatan di DPMD yang dilengkapi dengan adanya indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target dan lokasi selama 5 (lima) tahun yang dimulai pada tahun 2025 - 2029, serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program - program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam Rencana Strategis (Renstra) DPMD Kabupaten Tapin tahun 2025 - 2029 yang selanjutnya akan dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis DPMD tahun 2025 - 2029.

Perencanaan program prioritas dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) DPMD Kabupaten Tapin Kabupaten Tapin tahun 2025 - 2029 harus dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan *money follow program*. Keselarasan program pembangunan ini semakin penting sebab akan di jadikan dasar dalam penyusunan dokumen RKPD dan Renja PD disetiap tahunnya

Setiap program tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan. Kegiatan sub kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian target organisasi. Kegiatan dan sub kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi. Untuk lebih jelasnya mengenai rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif DPMD dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah				Nilai SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)		1. Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja) 2. Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja) 3. Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja) 4. Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Kinerja)	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan		Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti		
				Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindak lanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang		
				Meningkatnya kualitas Pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
					<i>Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti</i>	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan</i>		
					<i>Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)</i>		
		Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah			<i>Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah</i>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN		<i>Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas ASN</i>		
			Meningkatnya Pelayanan Sekretariat		<i>Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat</i>		
				Meningkatnya ASN yang berkualitas	<i>Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas ASN</i>	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	<i>Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik</i>		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian	<i>Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik</i>	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa				Indeks Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
		Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa			<i>Persentase Desa Mandiri</i>		
			Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa		<i>Persentase lembaga desa yang berprestasi</i>		
			Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan desa		<i>Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan</i>		
			Meningkatnya Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa		<i>Persentase Status Bumdes Maju</i>		
				Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan desa	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif</i>	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat	
				Terlaksananya Peningkatan kapasitas lembaga	<i>Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dibina</i>		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				kemasyarakatan desa		Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Lembaga Kemasyarakatan Desa	<i>Persentase hasil Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ditindaklanjuti</i>		
				Meningkatnya kerjasama kelembagaan antar desa	<i>Persentase kelembagaan antar desa yang bekerja sama</i>		
				Terlaksananya peningkatan kapasitas badan kerjasama antar desa dalam kabupaten	<i>Persentase Badan kerjasama antar desa yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan</i>		
				Meningkatnya kerjasama Badan kerjasama antar desa dengan pihak ketiga	<i>Persentase MoU yang dihasilkan</i>		
				Terlaksananya pendataan indeks desa	<i>Berita Acara penetapan status desa yang dihasilkan</i>		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Desa	<i>Persentase wilayah desa yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku</i>	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	
				Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektor terkait wilayah desa	<i>Jumlah pemerintah desa yang terfasilitasi terkait wilayah desa</i>		
				Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa	<i>Persentase Aparatur Desa yang terpilih sesuai ketentuan yang berlaku</i>		
				Meningkatnya pengetahuan atau pemahaman tentang tata cara pengangkatan perangkat desa	<i>Persentase Jumlah kepala desa yang diberikan sosialisasi</i>		
				Terlaksananya pelatihan tentang tata cara pengangkatan perangkat desa	<i>Persentase aparatur desa yang mendapatkan pelatihan tentang tata cara pengangkatan perangkat desa</i>		
				Meningkatnya pengelolaan Tata Kelola Keuangan Desa	<i>Persentase desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan</i>		
				Terlaksananya pelatihan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur	<i>Persentase Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan Desa yang</i>		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Keuangan Desa tentang Tata Kelola Keuangan Desa	<i>mendapatkan pelatihan tentang tata kelola keuangan desa</i>		
				Terlaksananya monitoring dan evaluasi laporan keuangan pemerintah desa	<i>Persentase hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti</i>		
				Tersedianya laporan keuangan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan	<i>Persentase laporan keuangan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan</i>		
				Meningkatnya tata kelola aset desa	<i>Persentase desa yang melakukan pengelolaan aset desa sesuai ketentuan</i>		
				Terlaksananya pelatihan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Tata Usaha/Kaur Umum tentang tata kelola aset desa	<i>Persentase Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Tata Usaha/Kaur Umum yang mendapatkan pelatihan tentang tata kelola aset desa</i>		
				Terlaksananya monitoring dan evaluasi laporan aset pemerintah desa	<i>Persentase hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti</i>		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Tersedianya laporan aset pemerintah desa sesuai dengan ketentuan	<i>Persentase laporan aset pemerintah desa sesuai dengan ketentuan</i>		
				Meningkatnya bumdes dan bumdesma yang menghasilkan PADes	<i>Persentase Bumdes dan bumdesma yang menghasilkan PADes</i>		
				Meningkatnya bumdes dan bumdesma yang aktif	<i>Persentase Bumdes dan Bumdesma yang aktif</i>		
				Terlaksananya pembinaan dan pendampingan bumdesa dan bumdesma	<i>Persentase bumdes dan bumdesma yang dibina</i>		
				Meningkatnya sumber daya pengelola bumdes dan bumdesma	<i>Persentase pengelola bumdes dan bumdesma yang memahami tugas dan fungsi</i>		
				Meningkatnya tata kelola administrasi, laporan keuangan bumdes dan bumdesma	<i>Persentase bumdes dan bumdesma yang tertib administrasi</i>		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna	<i>Persentase desa yang menghasilkan inovasi</i>		
					<i>Persentase desa yang memanfaatkan teknologi tepat guna</i>		
				Meningkatnya posyantek dan posyantekdes yang aktif	<i>Persentase posyantek dan posyantekdes yang aktif</i>		
				Meningkatnya tata kelola administrasi dalam posyantek dan posyantekdes	<i>Persentase posyantek dan posyantekdes yang tertib administrasi</i>		

TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				35.343.984.965,00		37.262.528.503,00		38.901.578.388,00		40.618.305.971,00		42.416.655.761,00		
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan Kinerja	26,1	27,5	12.682.344.242,00	27,8	12.762.528.503,00	28	12.401.578.388,00	28,2	12.918.305.971,00	28,4	13.016.655.761,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Pengukuran Kinerja	23,7	24		24,05		24,2		24,3		24,4		2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Pelaporan Kinerja	11,25	12		12,05		12,1		12,2		12,3		2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Evaluasi Internal	16	17,5		17,6		17,7		17,8		17,9		2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	100	100		100		100		100		100		2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Persentase ASN dengan Capaian Kinerja >90%	100	100		100		100		100		100		2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	90	92		94		96		98		100		2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), Meningkatnya Kinerja Tindak Lanjut dari Hasil Temuan Pemeriksaan, Meningkatkan Kualitas Kinerja ASN, Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat	90	100	12.682.344.242,00	100	12.762.528.503,00	100	12.401.578.388,00	100	12.918.305.971,00	100	13.016.655.761,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100	100		100		100		100		100		2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	100	100		100		100		100		100		2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Nilai Komponen AKIP-Perencanaan Klnerja	26.10	27,5		27,80		28		28,20		28,40		2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja	23.70	24		24,05		24,20		24,30		24,40		2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja	11.25	12		12,05		12,10		12,20		12,30		2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal	16.00	17,50		17,60		17,70		17,80		17,90		2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tindak lanjut Perencanaan Kinerja Atas Rekomendasi dari Mitra Kerja Bappelitbang	100	100	25.039.250,00	100	25.039.250,00	100	25.039.250,00	100	25.039.250,00	100	25.039.250,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Persentase Rekomendasi LHE AKIP yang Ditindak Lanjuti	100	100	25.039.250,00	100	25.039.250,00	100	25.039.250,00	100	25.039.250,00	100	25.039.250,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Persentase Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Kinerja yang Ditindaklanjuti	100	100	25.039.250,00	100	25.039.250,00	100	25.039.250,00	100	25.039.250,00	100	25.039.250,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah, Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14	15	25.039.250,00	15	25.039.250,00	16	25.039.250,00	16	25.039.250,00	16	25.039.250,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				25.039.250,00		25.039.250,00		25.039.250,00		25.039.250,00		25.039.250,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14	15	25.039.250,00	15	25.039.250,00	16	25.039.250,00	16	25.039.250,00	16	25.039.250,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggung Jawaban yang Sesuai dengan Standar Penatausahaan Keuangan	100	100	4.018.010.557,00	100	4.018.194.618,00	100	4.018.194.618,00	100	4.018.194.618,00	100	4.018.194.618,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Persentase Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100	100	4.018.010.557,00	100	4.018.194.618,00	100	4.018.194.618,00	100	4.018.194.618,00	100	4.018.194.618,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	2	7.999.800,00	2	7.999.800,00	2	7.999.800,00	2	7.999.800,00	2	7.999.800,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	10.010.200,00	1	10.010.200,00	1	10.010.200,00	1	10.010.200,00	1	10.010.200,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	308	420	4.000.000.557,00	560	4.000.184.618,00	630	4.000.184.618,00	700	4.000.184.618,00	770	4.000.184.618,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.000.000.557,00		4.000.184.618,00		4.000.184.618,00		4.000.184.618,00		4.000.184.618,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	308	420	4.000.000.557,00	560	4.000.184.618,00	630	4.000.184.618,00	700	4.000.184.618,00	770	4.000.184.618,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10.010.200,00		10.010.200,00		10.010.200,00		10.010.200,00		10.010.200,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	10.010.200,00	1	10.010.200,00	1	10.010.200,00	1	10.010.200,00	1	10.010.200,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				7.999.800,00		7.999.800,00		7.999.800,00		7.999.800,00		7.999.800,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	2	7.999.800,00	2	7.999.800,00	2	7.999.800,00	2	7.999.800,00	2	7.999.800,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	100	100	6.636.676.300,00	100	6.641.676.500,00	100	6.641.676.500,00	100	7.158.404.083,00	100	7.158.404.083,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Meningkatnya Tata Kelola Adiministrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4	4	39.997.600,00	4	39.997.600,00	4	39.997.600,00	4	39.997.600,00	4	39.997.600,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	38	12	75.091.600,00	12	75.091.600,00	12	75.091.600,00	12	75.091.600,00	12	75.091.600,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11	11	199.999.600,00	11	199.999.600,00	11	199.999.600,00	11	199.999.600,00	11	199.999.600,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	4	29.999.800,00	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	4	14.979.700,00	4	14.979.700,00	4	14.979.700,00	4	14.979.700,00	4	14.979.700,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	744	12	6.276.608.000,00	12	6.276.608.000,00	12	6.276.608.000,00	12	6.793.335.583,00	12	6.793.335.583,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				75.091.600,00		75.091.600,00		75.091.600,00		75.091.600,00		75.091.600,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	38	12	75.091.600,00	12	75.091.600,00	12	75.091.600,00	12	75.091.600,00	12	75.091.600,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				199.999.600,00		199.999.600,00		199.999.600,00		199.999.600,00		199.999.600,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11	11	199.999.600,00	11	199.999.600,00	11	199.999.600,00	11	199.999.600,00	11	199.999.600,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				29.999.800,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	4	29.999.800,00	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				39.997.600,00		39.997.600,00		39.997.600,00		39.997.600,00		39.997.600,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4	4	39.997.600,00	4	39.997.600,00	4	39.997.600,00	4	39.997.600,00	4	39.997.600,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				14.979.700,00		14.979.700,00		14.979.700,00		14.979.700,00		14.979.700,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2	4	14.979.700,00	4	14.979.700,00	4	14.979.700,00	4	14.979.700,00	4	14.979.700,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6.276.608.000,00		6.276.608.000,00		6.276.608.000,00		6.793.335.583,00		6.793.335.583,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	744	12	6.276.608.000,00	12	6.276.608.000,00	12	6.276.608.000,00	12	6.793.335.583,00	12	6.793.335.583,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik	100	100	1.334.165.600,00	100	1.409.165.600,00	100	1.335.355.485,00	100	1.335.355.485,00	100	1.335.355.485,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1	648.697.800,00	1	723.697.800,00	1	649.887.685,00	1	649.887.685,00	1	649.887.685,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	10	685.467.800,00	12	685.467.800,00	20	685.467.800,00	15	685.467.800,00	15	685.467.800,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				685.467.800,00		685.467.800,00		685.467.800,00		685.467.800,00		685.467.800,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	10	685.467.800,00	12	685.467.800,00	20	685.467.800,00	15	685.467.800,00	15	685.467.800,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				648.697.800,00		723.697.800,00		649.887.685,00		649.887.685,00		649.887.685,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1	648.697.800,00	1	723.697.800,00	1	649.887.685,00	1	649.887.685,00	1	649.887.685,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelulusan ASN Perangkat Daerah yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas ASN	100	100	243.673.416,00	100	243.673.416,00	100	243.673.416,00	100	243.673.416,00	100	243.673.416,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya ASN yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	14.994.000,00	1	14.994.000,00	1	14.994.000,00	1	14.994.000,00	1	14.994.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	12	99.996.696,00	12	99.996.696,00	12	99.996.696,00	12	99.996.696,00	12	99.996.696,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8	12	128.682.720,00	12	128.682.720,00	12	128.682.720,00	12	128.682.720,00	12	128.682.720,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				14.994.000,00		14.994.000,00		14.994.000,00		14.994.000,00		14.994.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	14.994.000,00	1	14.994.000,00	1	14.994.000,00	1	14.994.000,00	1	14.994.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				99.996.696,00		99.996.696,00		99.996.696,00		99.996.696,00		99.996.696,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	12	99.996.696,00	12	99.996.696,00	12	99.996.696,00	12	99.996.696,00	12	99.996.696,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				128.682.720,00		128.682.720,00		128.682.720,00		128.682.720,00		128.682.720,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8	12	128.682.720,00	12	128.682.720,00	12	128.682.720,00	12	128.682.720,00	12	128.682.720,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik	100	100	424.779.119,00	100	424.779.119,00	100	137.639.119,00	100	137.639.119,00	100	235.988.909,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1	287.140.000,00	1	287.140.000,00	1	-	1	-	1	98.349.790,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	30	37.695.119,00	30	37.695.119,00	30	37.695.119,00	30	37.695.119,00	30	37.695.119,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	9	99.944.000,00	9	99.944.000,00	10	99.944.000,00	10	99.944.000,00	10	99.944.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				99.944.000,00		99.944.000,00		99.944.000,00		99.944.000,00		99.944.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	9	99.944.000,00	9	99.944.000,00	10	99.944.000,00	10	99.944.000,00	10	99.944.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				37.695.119,00		37.695.119,00		37.695.119,00		37.695.119,00		37.695.119,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	30	37.695.119,00	30	37.695.119,00	30	37.695.119,00	30	37.695.119,00	30	37.695.119,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				287.140.000,00		287.140.000,00		-		-		98.349.790,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1	287.140.000,00	1	287.140.000,00	1	-	1	-	1	98.349.790,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan	0	100	151.159.550,00	100	151.159.550,00	100	352.061.100,00	100	192.061.100,00	100	192.061.100,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan	0	100	151.159.550,00	100	151.159.550,00	100	352.061.100,00	100	192.061.100,00	100	192.061.100,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase wilayah desa yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	90	100	151.159.550,00	100	151.159.550,00	100	352.061.100,00	100	192.061.100,00	100	192.061.100,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Jumlah pemerintah desa yang terfasilitasi terkait wilayah desa	126	1	151.159.550,00	1	151.159.550,00	1	352.061.100,00	1	192.061.100,00	1	192.061.100,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Desa, Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektor terkait wilayah desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	0	35	60.000.000,00	23	60.000.000,00	23	260.000.000,00	23	100.000.000,00	22	100.000.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	126	126	33.098.450,00	126	33.098.450,00	126	34.000.000,00	126	34.000.000,00	126	34.000.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	126	1	58.061.100,00	1	58.061.100,00	1	58.061.100,00	1	58.061.100,00	1	58.061.100,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.02.2.01.0002 - Fasilitas Tata Wilayah Desa				58.061.100,00		58.061.100,00		58.061.100,00		58.061.100,00		58.061.100,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Terlaksananya Fasilitas Penataan Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	126	1	58.061.100,00	1	58.061.100,00	1	58.061.100,00	1	58.061.100,00	1	58.061.100,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.02.2.01.0003 - Fasilitas Penataan Kewenangan Desa				33.098.450,00		33.098.450,00		34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Terlaksananya Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	126	126	33.098.450,00	126	33.098.450,00	126	34.000.000,00	126	34.000.000,00	126	34.000.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.02.2.01.0006 - Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa				60.000.000,00		60.000.000,00		260.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	0	35	60.000.000,00	23	60.000.000,00	23	260.000.000,00	23	100.000.000,00	22	100.000.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan	0	100	16.713.258.300,00	100	18.513.258.300,00	100	20.120.315.000,00	100	21.410.315.000,00	100	22.510.315.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Persentase lembaga desa yang berprestasi	10,3	73,8		74		74,9		75		75,9		2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa, Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan	0	100	16.713.258.300,00	100	18.513.258.300,00	100	20.120.315.000,00	100	21.410.315.000,00	100	22.510.315.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Persentase lembaga desa yang berprestasi	10.30	73,8		74		74,9		75		75,9		2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.03.2.01 - Fasilitas Kerja Sama antar Desa	Persentase Desa yang Melakukan Kerja Sama Sesuai Ketentuan	90	100	16.713.258.300,00	100	18.513.258.300,00	100	20.120.315.000,00	100	21.410.315.000,00	100	22.510.315.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Terfasilitasinya kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	7	1	14.500.000.000,00	1	16.300.000.000,00	1	17.800.000.000,00	1	19.300.000.000,00	1	20.200.000.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	4	4	27.943.300,00	4	27.943.300,00	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	4	4	2.185.315.000,00	4	2.185.315.000,00	4	2.285.315.000,00	4	2.075.315.000,00	4	2.275.315.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.03.2.01.0001 - Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				27.943.300,00		27.943.300,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	4	4	27.943.300,00	4	27.943.300,00	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.03.2.01.0002 - Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				2.185.315.000,00		2.185.315.000,00		2.285.315.000,00		2.075.315.000,00		2.275.315.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	4	4	2.185.315.000,00	4	2.185.315.000,00	4	2.285.315.000,00	4	2.075.315.000,00	4	2.275.315.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.03.2.01.0003 - Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan				14.500.000.000,00		16.300.000.000,00		17.800.000.000,00		19.300.000.000,00		20.200.000.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Terlaksananya Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	7	1	14.500.000.000,00	1	16.300.000.000,00	1	17.800.000.000,00	1	19.300.000.000,00	1	20.200.000.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentasi Perkembangan Status BUMDes Maju	5	6	4.246.661.550,00	7	4.246.661.550,00	8	4.438.703.300,00	9	4.358.703.300,00	10	4.758.703.300,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan	0	100		100		100		100		100		2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa, Meningkatnya Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa	Persentase Perkembangan Status BUMDes Maju	5	6	4.246.661.550,00	7	4.246.661.550,00	8	4.438.703.300,00	9	4.358.703.300,00	10	4.758.703.300,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan	0	100		100		100		100		100		2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa yang terpilih sesuai ketentuan yang berlaku	0	100	4.246.661.550,00	100	4.246.661.550,00	100	4.438.703.300,00	100	4.358.703.300,00	100	4.758.703.300,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Persentase Jumlah kepala desa yang diberikan sosialisasi	0	100	4.246.661.550,00	100	4.246.661.550,00	100	4.438.703.300,00	100	4.358.703.300,00	100	4.758.703.300,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Persentase aparatur desa yang mendapatkan pelatihan tentang tata cara pengangkatan perangkat desa	0	100	4.246.661.550,00	100	4.246.661.550,00	100	4.438.703.300,00	100	4.358.703.300,00	100	4.758.703.300,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Persentase desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan	0	100	4.246.661.550,00	100	4.246.661.550,00	100	4.438.703.300,00	100	4.358.703.300,00	100	4.758.703.300,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Persentase Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan Desa yang mendapatkan pelatihan tentang tata kelola keuangan desa	0	100	4.246.661.550,00	100	4.246.661.550,00	100	4.438.703.300,00	100	4.358.703.300,00	100	4.758.703.300,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Persentase hasil monitoring dan evaluasi yang ditindakkanjuti	0	100	4.246.661.550,00	100	4.246.661.550,00	100	4.438.703.300,00	100	4.358.703.300,00	100	4.758.703.300,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Persentase laporan keuangan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan	0	100	4.246.661.550,00	100	4.246.661.550,00	100	4.438.703.300,00	100	4.358.703.300,00	100	4.758.703.300,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Persentase desa yang melakukan pengelolaan aset desa sesuai ketentuan	0	100	4.246.661.550,00	100	4.246.661.550,00	100	4.438.703.300,00	100	4.358.703.300,00	100	4.758.703.300,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Persentase Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Tata Usaha/Kaur Umum yang mendapatkan pelatihan tentang tata kelola aset desa	0	100	4.246.661.550,00	100	4.246.661.550,00	100	4.438.703.300,00	100	4.358.703.300,00	100	4.758.703.300,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Persentase hasil monitoring dan evaluasi yang ditindakkanjuti	0	100	4.246.661.550,00	100	4.246.661.550,00	100	4.438.703.300,00	100	4.358.703.300,00	100	4.758.703.300,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase laporan aset pemerintah desa sesuai dengan ketentuan	0	100	4.246.661.550,00	100	4.246.661.550,00	100	4.438.703.300,00	100	4.358.703.300,00	100	4.758.703.300,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Persentase Bumdes dan Bumdesma yang menghasilkan PADes	54	65	4.246.661.550,00	67	4.246.661.550,00	69	4.438.703.300,00	70	4.358.703.300,00	72	4.758.703.300,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Persentase bumdes dan bumdesma yang aktif	74	82	4.246.661.550,00	86	4.246.661.550,00	90	4.438.703.300,00	94	4.358.703.300,00	98	4.758.703.300,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Jumlah bumdes dan bumdesma yang bekerja sama dengan pihak ketiga	1	1	4.246.661.550,00	1	4.246.661.550,00	1	4.438.703.300,00	1	4.358.703.300,00	1	4.758.703.300,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Persentase bumdes dan bumdesma yang berbadan hukum	50	52	4.246.661.550,00	54	4.246.661.550,00	56	4.438.703.300,00	58	4.358.703.300,00	60	4.758.703.300,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Jumlah dokumen pengajuan legalitas hukum yang di monitoring	63	65	4.246.661.550,00	67	4.246.661.550,00	69	4.438.703.300,00	71	4.358.703.300,00	73	4.758.703.300,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Jumlah bumdes dan bumdesma yang difasilitasi legalitas pengajuan hukumnya	63	65	4.246.661.550,00	67	4.246.661.550,00	69	4.438.703.300,00	71	4.358.703.300,00	73	4.758.703.300,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa, Meningkatkan pengetahuan atau pemahaman tentang tata cara pengangkatan perangkat desa, Terlaksananya pelatihan tentang tata cara pengangkatan perangkat desa , Meningkatkan pengelolaan tata kelola keuangan desa, Terlaksananya pelatihan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan Desa tentang Tata Kelola Keuangan Desa, Terlaksananya monitoring dan evaluasi laporan keuangan pemerintah desa, Tersedianya laporan keuangan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan, Meningkatnya tata kelola aset desa, Terlaksananya pelatihan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Tata Usaha/Kaur Umum tentang tata kelola aset desa, Terlaksananya monitoring dan evaluasi laporan aset pemerintah desa, Tersedianya laporan aset pemerintah desa sesuai dengan ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1	2	74.418.200,00	2	74.418.200,00	2	104.418.200,00	2	74.418.200,00	2	74.418.200,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1	39	2.545.795.660,00	0	0	27	2.545.795.660,00	0	0	60	2.545.795.660,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	1	126	36.275.440,00	126	36.275.440,00	126	36.275.440,00	126	36.275.440,00	126	36.275.440,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	0	126	20.000.000,00	126	20.000.000,00	126	25.000.000,00	126	25.000.000,00	126	25.000.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1	1	18.468.200,00	1	18.468.200,00	1	18.468.200,00	1	18.468.200,00	1	18.468.200,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1	126	79.046.700,00	126	79.046.700,00	126	79.046.700,00	126	79.046.700,00	126	79.046.700,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1	126	70.934.100,00	126	70.934.100,00	126	170.934.100,00	126	70.934.100,00	126	120.934.100,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1	1	611.079.400,00	1	611.079.400,00	1	611.079.400,00	1	661.079.400,00	1	761.079.400,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	1	126	106.322.600,00	126	106.322.600,00	126	106.322.600,00	126	106.322.600,00	126	106.322.600,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1	126	104.678.700,00	126	104.678.700,00	126	148.649.650,00	126	148.649.650,00	126	223.649.650,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	1	126	257.310.850,00	126	257.310.850,00	126	257.310.850,00	126	257.310.850,00	126	357.310.850,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	1	126	55.749.200,00	126	55.749.200,00	126	55.749.200,00	126	55.749.200,00	126	55.749.200,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	126	126	90.268.700,00	126	1.371.631.130,00	126	90.268.700,00	126	1.375.666.530,00	126	115.268.700,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	126	126	99.504.200,00	126	1.380.866.630,00	126	124.504.200,00	126	1.384.902.030,00	126	174.504.200,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	50	126	16.929.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	0	126	29.880.400,00	126	29.880.400,00	126	29.880.400,00	126	29.880.400,00	126	29.880.400,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	0	126	30.000.000,00	126	30.000.000,00	126	35.000.000,00	126	35.000.000,00	126	35.000.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.04.2.01.0001 - Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				70.934.100,00		70.934.100,00		170.934.100,00		70.934.100,00		120.934.100,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1	126	70.934.100,00	126	70.934.100,00	126	170.934.100,00	126	70.934.100,00	126	120.934.100,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.04.2.01.0002 - Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa				106.322.600,00		106.322.600,00		106.322.600,00		106.322.600,00		106.322.600,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	1	126	106.322.600,00	126	106.322.600,00	126	106.322.600,00	126	106.322.600,00	126	106.322.600,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.04.2.01.0003 - Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				104.678.700,00		104.678.700,00		148.649.650,00		148.649.650,00		223.649.650,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1	126	104.678.700,00	126	104.678.700,00	126	148.649.650,00	126	148.649.650,00	126	223.649.650,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.04.2.01.0004 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa				257.310.850,00		257.310.850,00		257.310.850,00		257.310.850,00		357.310.850,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	1	126	257.310.850,00	126	257.310.850,00	126	257.310.850,00	126	257.310.850,00	126	357.310.850,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				99.504.200,00		1.380.866.630,00		124.504.200,00		1.384.902.030,00		174.504.200,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	126	126	99.504.200,00	126	1.380.866.630,00	126	124.504.200,00	126	1.384.902.030,00	126	174.504.200,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.04.2.01.0006 - Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa				20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	0	126	20.000.000,00	126	20.000.000,00	126	25.000.000,00	126	25.000.000,00	126	25.000.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.04.2.01.0007 - Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				29.880.400,00		29.880.400,00		29.880.400,00		29.880.400,00		29.880.400,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	0	126	29.880.400,00	126	29.880.400,00	126	29.880.400,00	126	29.880.400,00	126	29.880.400,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				611.079.400,00		611.079.400,00		611.079.400,00		661.079.400,00		761.079.400,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1	1	611.079.400,00	1	611.079.400,00	1	611.079.400,00	1	661.079.400,00	1	761.079.400,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				2.545.795.660,00		0		2.545.795.660,00		0		2.545.795.660,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1	39	2.545.795.660,00	0	0	27	2.545.795.660,00	0	0	60	2.545.795.660,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.04.2.01.0010 - Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				18.468.200,00		18.468.200,00		18.468.200,00		18.468.200,00		18.468.200,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1	1	18.468.200,00	1	18.468.200,00	1	18.468.200,00	1	18.468.200,00	1	18.468.200,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.04.2.01.0011 - Fasilitas Penyusunan Profil Desa				79.046.700,00		79.046.700,00		79.046.700,00		79.046.700,00		79.046.700,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1	126	79.046.700,00	126	79.046.700,00	126	79.046.700,00	126	79.046.700,00	126	79.046.700,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.04.2.01.0012 - Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa				30.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Terlaksananya Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	0	126	30.000.000,00	126	30.000.000,00	126	35.000.000,00	126	35.000.000,00	126	35.000.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.04.2.01.0013 - Fasilitas Pengelolaan Aset Desa				55.749.200,00		55.749.200,00		55.749.200,00		55.749.200,00		55.749.200,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	1	126	55.749.200,00	126	55.749.200,00	126	55.749.200,00	126	55.749.200,00	126	55.749.200,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.04.2.01.0014 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				90.268.700,00		1.371.631.130,00		90.268.700,00		1.375.666.530,00		115.268.700,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	126	126	90.268.700,00	126	1.371.631.130,00	126	90.268.700,00	126	1.375.666.530,00	126	115.268.700,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.04.2.01.0015 - Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa				16.929.200,00		0		0		0		0	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	50	126	16.929.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.04.2.01.0016 - Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa				36.275.440,00		36.275.440,00		36.275.440,00		36.275.440,00		36.275.440,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Terlaksananya Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa	1	126	36.275.440,00	126	36.275.440,00	126	36.275.440,00	126	36.275.440,00	126	36.275.440,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.04.2.01.0018 - Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				74.418.200,00		74.418.200,00		104.418.200,00		74.418.200,00		74.418.200,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Terlaksananya Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1	2	74.418.200,00	2	74.418.200,00	2	104.418.200,00	2	74.418.200,00	2	74.418.200,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga desa yang berprestasi	10,3	73,8	1.550.561.323,00	74	1.588.920.600,00	74,9	1.588.920.600,00	75	1.738.920.600,00	75,9	1.938.920.600,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Persentase Perkembangan Status BUMDes Maju	5	6		7	8	9	10	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, Meningkatnya Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa	Persentase lembaga desa yang berprestasi	10.30	73,8	1.550.561.323,00	74	1.588.920.600,00	74,9	1.588.920.600,00	75	1.738.920.600,00	75,9	1.938.920.600,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Persentase Perkembangan Status BUMDes Maju	5	6		7		8		9		10		2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif	81	82	1.550.561.323,00	82,5	1.588.920.600,00	83	1.588.920.600,00	83,5	1.738.920.600,00	84	1.938.920.600,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dibina	100	100	1.550.561.323,00	100	1.588.920.600,00	100	1.588.920.600,00	100	1.738.920.600,00	100	1.938.920.600,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase hasil Monitoring dan Evaluasi Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ditindaklanjuti	50	50,2	1.550.561.323,00	50,3	1.588.920.600,00	50,4	1.588.920.600,00	50,5	1.738.920.600,00	50,5	1.938.920.600,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Persentase kelembagaan antar desa yang bekerja sama	100	100	1.550.561.323,00	100	1.588.920.600,00	100	1.588.920.600,00	100	1.738.920.600,00	100	1.938.920.600,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Persentase badan kerjasama antar desa yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan	70	72	1.550.561.323,00	72,5	1.588.920.600,00	73	1.588.920.600,00	73,5	1.738.920.600,00	74	1.938.920.600,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Persentasi MoU yang dihasilkan	42	45	1.550.561.323,00	45	1.588.920.600,00	45,5	1.588.920.600,00	46	1.738.920.600,00	46,5	1.938.920.600,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Persentase desa yang menghasilkan inovasi	14,29	15,87	1.550.561.323,00	17,46	1.588.920.600,00	19,05	1.588.920.600,00	20,63	1.738.920.600,00	22,22	1.938.920.600,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Persentase desa yang memanfaatkan teknologi tepat guna	5	7	1.550.561.323,00	9	1.588.920.600,00	11	1.588.920.600,00	13	1.738.920.600,00	15	1.938.920.600,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Persentase posyantek dan posyantekdes yang aktif	50	55	1.550.561.323,00	57	1.588.920.600,00	59	1.588.920.600,00	60	1.738.920.600,00	62	1.938.920.600,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Persentase posyantek dan posyantekdes yang tertib administrasi	100	100	1.550.561.323,00	100	1.588.920.600,00	100	1.588.920.600,00	100	1.738.920.600,00	100	1.938.920.600,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Persentase Bumdes dan Bumdesma yang dibina	100	100	1.550.561.323,00	100	1.588.920.600,00	100	1.588.920.600,00	100	1.738.920.600,00	100	1.938.920.600,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Persentase bumdes dan bumdesma yang tertib administrasi dan berbadan hukum	35	51	1.550.561.323,00	53	1.588.920.600,00	55	1.588.920.600,00	57	1.738.920.600,00	59	1.938.920.600,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Persentase pengelola bumdes dan bumdesma yang memahami tugas dan fungsi	70	72	1.550.561.323,00	74	1.588.920.600,00	76	1.588.920.600,00	78	1.738.920.600,00	80	1.938.920.600,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Jumlah bumdes yang mendapatkan reward		51	1.550.561.323,00	53	1.588.920.600,00	55	1.588.920.600,00	57	1.738.920.600,00	59	1.938.920.600,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan desa, Terlaksananya Peningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Lembaga Kemasyarakatan Desa, Terlaksananya peningkatan kapasitas badan kerjasama antar desa dalam kabupaten, Meningkatnya kerjasama Badan kerjasama antar desa dengan pihak ketiga	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1	1	225.939.521,00	1	235.939.521,00	1	235.939.521,00	1	235.939.521,00	1	235.939.521,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1	1	388.920.550,00	1	388.920.550,00	1	388.920.550,00	1	488.920.550,00	1	488.920.550,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	0	1	113.227.150,00	1	129.586.427,00	1	129.586.427,00	1	129.586.427,00	1	129.586.427,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	5	322.474.052,00	5	334.474.052,00	5	334.474.052,00	5	334.474.052,00	5	434.474.052,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	4	500.000.050,00	4	500.000.050,00	4	500.000.050,00	4	550.000.050,00	4	650.000.050,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.05.2.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masvarakat Hukum Adat				225.939.521,00		235.939.521,00		235.939.521,00		235.939.521,00		235.939.521,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1	1	225.939.521,00	1	235.939.521,00	1	235.939.521,00	1	235.939.521,00	1	235.939.521,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				322.474.052,00		334.474.052,00		334.474.052,00		334.474.052,00		434.474.052,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	5	322.474.052,00	5	334.474.052,00	5	334.474.052,00	5	334.474.052,00	5	434.474.052,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.05.2.01.0005 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				388.920.550,00		388.920.550,00		388.920.550,00		488.920.550,00		488.920.550,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1	1	388.920.550,00	1	388.920.550,00	1	388.920.550,00	1	488.920.550,00	1	488.920.550,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.05.2.01.0006 - Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				500.000.050,00		500.000.050,00		500.000.050,00		550.000.050,00		650.000.050,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Terlaksananya Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	4	500.000.050,00	4	500.000.050,00	4	500.000.050,00	4	550.000.050,00	4	650.000.050,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.05.2.01.0007 - Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				113.227.150,00		129.586.427,00		129.586.427,00		129.586.427,00		129.586.427,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	0	1	113.227.150,00	1	129.586.427,00	1	129.586.427,00	1	129.586.427,00	1	129.586.427,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Adapun IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin. Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KEPALA DINAS													
Sasaran	Indikator	Rumus Perhitungan	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi TW I 2025	Target						Keterangan
							2025 Perubahan	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	77,05	80,05	0	80,05	81	81,50	82	82,50	83	-
Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Kompilasi nilai dari masing-masing unsur yang ada pada aplikasi IP-ASN	Nilai	65,91	80	0	80	80,50	81	81,50	82	82,50	-
Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan tata kelola desa	Persentase Desa Mandiri	$\frac{\text{Jumlah Desa Berstatus Mandiri}}{\text{Jumlah Seluruh Desa}} \times 100\%$	%	59,52	3,17	0	38,09	41,27	44,44	47,62	50,79	53,97	* Perubahan (Menurunnya) Target pada Tahun 2025 karena adanya perubahan formulasi perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa

4.3. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Desa	Poin	0	490	493,2	496,4	499,6	502,8	506	
II	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Nilai SAKIP	poin	71	72,95	74,90	76,85	78,80	80,75	82,70	
III	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase Desa Mandiri	%	59,52	38,09	41,27	44,44	47,62	50,79	53,97	
2	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100	100	100	100	100	100	100	

4.4. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Adapun IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					Ket
			2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	20%	25%	33,33%	50%	100%	

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 ini merupakan upaya untuk melanjutkan berbagai kebijakan bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai permasalahan dan isu strategis dalam rangka mewujudkan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa. Keberhasilan implementasi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh segenap unsur dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 dalam menyelenggarakan pembangunan daerah di Kabupaten Tapin.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 ini disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin dalam menjalankan berbagai prioritas pembangunan daerah. Selain itu, Renstra ini juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja dan dipertanggung jawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP).

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggung jawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami dinamika perubahan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 tidak bersifat

kaku dan senantiasa dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari setiap jajaran di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 sangat diharapkan.

Dengan demikian, penting bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 untuk mengedepankan aspek perencanaan perangkat daerah beserta fungsi pengendalian dan evaluasi.

BUPATI TAPIN,

YAMANI

LAMPIRAN TABEL DI SIPD

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
- meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - menurunkan kemiskinan dan ketimpangan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa, Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		Nilai SAKIP (poin)	71	72,95	74,90	76,85	78,80	80,75	82,70	
			Indeks Desa (Poin)	0	490	493,2	496,4	499,6	502,8	506	
		Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa	Persentase Desa Mandiri (%)	59,52	38,09	41,27	44,44	47,62	50,79	53,97	
			Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	77,05	80,05	81	81,5	82	82,5	83	
			Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah (Poin)	65,91	80	80,5	81	81,5	82	82,5	

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					35.343.984.965		37.262.528.503		38.901.578.388		40.618.305.971		42.416.655.761	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.682.344.242		12.762.528.503		12.401.578.388		12.918.305.971		13.016.655.761	
Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP- Perencanaan Kinerja (Nilai)	26,1	27,40	27,5	25.039.250	27,8	25.039.250	28	25.039.250	28,5	25.039.250	28,7	25.039.250	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja (Nilai)	23,7	25,05	26		26,2		26,5		26,8		27		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja (Nilai)	11,25	11,3	11,6		11,7		12		12,5		13		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal (Nilai)	16	16,3	16,5		17,2		17,3		18		18,3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya Kinerja Tindak Lanjut dari Hasil Temuan Pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	4.018.010.557	100	4.018.194.618	100	4.018.194.618	100	4.018.194.618	100	4.018.194.618	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	100	100	100	6.880.349.716	100	6.885.349.916	100	6.885.349.916	100	7.402.077.499	100	7.402.077.499	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	90	91	92	1.758.944.719	94	1.833.944.719	96	1.472.994.604	98	1.472.994.604	100	1.571.344.394	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					151.159.550		151.159.550		352.061.100		192.061.100		192.061.100	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan (%)	0	65	100	151.159.550	100	151.159.550	100	352.061.100	100	192.061.100	100	192.061.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					16.713.258.300		18.513.258.300		20.120.315.000		21.410.315.000		22.510.315.000	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan (%)	0	65	100	2.213.258.300	100	2.213.258.300	100	2.320.315.000	100	2.110.315.000	100	2.310.315.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	Persentase lembaga desa yang berprestasi (%)	10,3	72,9	73,8	14.500.000.000	74	16.300.000.000	74,9	17.800.000.000	75	19.300.000.000	75,9	20.200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					4.246.661.550		4.246.661.550		4.438.703.300		4.358.703.300		4.758.703.300	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan (%)	0	65	100	3.635.582.150	100	3.635.582.150	100	3.827.623.900	100	3.697.623.900	100	3.997.623.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa	Persentase Perkembangan Status BUMDes Maju (%)	5	6	6	611.079.400	7	611.079.400	8	611.079.400	9	661.079.400	10	761.079.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					1.550.561.323		1.588.920.600		1.588.920.600		1.738.920.600		1.938.920.600	
Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	Persentase lembaga desa yang berprestasi (%)	10,3	72,9	73,8	661.640.723	74	700.000.000	74,9	700.000.000	75	700.000.000	75,9	800.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa	Persentase Perkembangan Status BUMDes Maju (%)	5	6	6	888.920.600	7	888.920.600	8	888.920.600	9	1.038.920.600	10	1.138.920.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
TOTAL KESELURUHAN					35343984965.00		37262528503.00		38901578388.00		40618305971.00		42416655761.00	

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
- menurunnya kemiskinan dan ketimpangan - meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa, Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah				Nilai SAKIP (poin)		
					Indeks Desa (Poin)		
		Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa			Persentase Desa Mandiri (%)		
					Persentase pengentasan desa tertinggal (%)		
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa			persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan (%)	2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA	
					Meningkatnya pengelolaan wilayah desa	2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	
						2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	
						2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	
						2.13.02.2.01.0002 - Fasilitas Tata Wilayah Desa	
						2.13.02.2.01.0003 - Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	

			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	2.13.02.2.01.0006 - Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa		persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan (%)	2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.13.03.2.01.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.13.03.2.01.0002 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa		persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan (%)	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	

				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
				Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
				Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	

				Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0001 - Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0002 - Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	
				Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
				Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)	2.13.04.2.01.0006 - Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	
				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0007 - Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	
				Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	
				Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	2.13.04.2.01.0010 - Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
				Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	2.13.04.2.01.0011 - Fasilitas Penyusunan Profil Desa	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0012 - Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	

					Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01.0014 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	2.13.04.2.01.0016 - Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	2.13.04.2.01.0018 - Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
				Meningkatnya pengelolaan wilayah desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
				Meningkatnya pengelolaan tata kelola keuangan desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0003 - Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0004 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	
				Meningkatnya pengelolaan wilayah desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)	2.13.04.2.01.0015 - Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
				Meningkatnya tata kelola aset desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	

		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0013 - Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	
Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa		Persentase lembaga desa yang berprestasi (%)	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
	Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
	Terlaksananya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	

		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	2.13.05.2.01.0002 - Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
	meningkatkan semangat kebersamaan ke gotong royongan dan ke swadayaan masyarakat dalam mendukung program pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	2.13.05.2.01.0007 - Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa		Persentase lembaga desa yang berprestasi (%)	2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
	Meningkatnya kerjasama badan kerjasama antar desa dengan pihak ketiga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	2.13.03.2.01 - Fasilitas Kerja Sama antar Desa	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	2.13.03.2.01.0003 - Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	
Meningkatnya Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa		Persentase Perkembangan Status BUMDes Maju (%)	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
	Meningkatnya BUMDES dan BUMDESMA yang menghasilkan PADes	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	

			Meningkatnya Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa		Persentase Perkembangan Status BUMDes Maju (%)	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
			Meningkatnya BUMDES dan BUMDESMA yang menghasilkan PADes		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya BUMDES dan BUMDESMA yang menghasilkan PADes		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	2.13.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
			Meningkatnya Inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)		
					Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah (poin)		
		Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)			Nilai Komponen AKIP-Perencanaan Kinerja (Nilai)	2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

					Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja (Nilai)	2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja (Nilai)	2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal (Nilai)	2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah, Meningkatkan Kualitas Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.13.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Meningkatnya Kinerja Tindak Lanjut dari Hasil Temuan Pemeriksaan		Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.13.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.13.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
		Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.13.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.13.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya ASN yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.13.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat			Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya kualitas barang milik daerah (BMD)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
		Meningkatnya kualitas barang milik daerah (BMD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.13.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		

					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.13.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.13.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				35.343.984.965		37.262.528.503		38.901.578.388		40.618.305.971		42.416.655.761		
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.682.344.242		12.762.528.503		12.401.578.388		12.918.305.971		13.016.655.761		
Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP- Perencanaan Kinerja (Nilai)	26,1	27,5	25.039.250	27,8	25.039.250	28	25.039.250	28,5	25.039.250	28,7	25.039.250	2.13.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja (Nilai)	23,7	26		26,2		26,5		26,8		27			
	Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja (Nilai)	11,25	11,6		11,7		12		12,5		13			
	Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal (Nilai)	16	16,5		17,2		17,3		18		18,3			
2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25.039.250		25.039.250		25.039.250		25.039.250		25.039.250		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah, Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	14	15	25.039.250	15	25.039.250	16	25.039.250	16	25.039.250	16	25.039.250		
2.13.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				25.039.250		25.039.250		25.039.250		25.039.250		25.039.250		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	14	15	25.039.250	15	25.039.250	16	25.039.250	16	25.039.250	16	25.039.250		
Meningkatnya Kinerja Tindak Lanjut dari Hasil Temuan Pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	4.018.010.557	100	4.018.194.618	100	4.018.194.618	100	4.018.194.618	100	4.018.194.618		
2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.018.010.557		4.018.194.618		4.018.194.618		4.018.194.618		4.018.194.618		

Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	308	420	4.018.010.557	560	4.018.194.618	630	4.018.194.618	700	4.018.194.618	770	4.018.194.618		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.000.000.557		4.000.184.618		4.000.184.618		4.000.184.618		4.000.184.618		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	308	420	4.000.000.557	560	4.000.184.618	630	4.000.184.618	700	4.000.184.618	770	4.000.184.618		
2.13.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10.010.200		10.010.200		10.010.200		10.010.200		10.010.200		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	10.010.200	1	10.010.200	1	10.010.200	1	10.010.200	1	10.010.200		
2.13.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				7.999.800		7.999.800		7.999.800		7.999.800		7.999.800		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	2	7.999.800	2	7.999.800	2	7.999.800	2	7.999.800	2	7.999.800		
Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	100	100	6.880.349.716	100	6.885.349.916	100	6.885.349.916	100	7.402.077.499	100	7.402.077.499		
2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				6.636.676.300		6.641.676.500		6.641.676.500		7.158.404.083		7.158.404.083		
Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	11	11	6.636.676.300	11	6.641.676.500	11	6.641.676.500	11	7.158.404.083	11	7.158.404.083		

	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	38	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	744	12		12		12		12		12			
2.13.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				75.091.600		75.091.600		75.091.600		75.091.600		75.091.600		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	38	12	75.091.600	12	75.091.600	12	75.091.600	12	75.091.600	12	75.091.600		
2.13.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				199.999.600		199.999.600		199.999.600		199.999.600		199.999.600		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	11	11	199.999.600	11	199.999.600	11	199.999.600	11	199.999.600	11	199.999.600		
2.13.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				29.999.800		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6	4	29.999.800	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000		
2.13.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				39.997.600		39.997.600		39.997.600		39.997.600		39.997.600		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	4	4	39.997.600	4	39.997.600	4	39.997.600	4	39.997.600	4	39.997.600		
2.13.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				14.979.700		14.979.700		14.979.700		14.979.700		14.979.700		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2	4	14.979.700	4	14.979.700	4	14.979.700	4	14.979.700	4	14.979.700		
2.13.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6.276.608.000		6.276.608.000		6.276.608.000		6.793.335.583		6.793.335.583		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	744	12	6.276.608.000	12	6.276.608.000	12	6.276.608.000	12	6.793.335.583	12	6.793.335.583		
2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				243.673.416		243.673.416		243.673.416		243.673.416		243.673.416		
Meningkatnya ASN yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	243.673.416	1	243.673.416	1	243.673.416	1	243.673.416	1	243.673.416		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8	12		12		12		12		12			

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5	12		12		12		12		12			
2.13.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				14.994.000		14.994.000		14.994.000		14.994.000		14.994.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	14.994.000	1	14.994.000	1	14.994.000	1	14.994.000	1	14.994.000		
2.13.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				99.996.696		99.996.696		99.996.696		99.996.696		99.996.696		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5	12	99.996.696	12	99.996.696	12	99.996.696	12	99.996.696	12	99.996.696		
2.13.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				128.682.720		128.682.720		128.682.720		128.682.720		128.682.720		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8	12	128.682.720	12	128.682.720	12	128.682.720	12	128.682.720	12	128.682.720		
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	90	92	1.758.944.719	94	1.833.944.719	96	1.472.994.604	98	1.472.994.604	100	1.571.344.394		
2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.334.165.600		1.409.165.600		1.335.355.485		1.335.355.485		1.335.355.485		
Meningkatnya kualitas barang milik daerah (BMD)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1.334.165.600	1	1.409.165.600	1	1.335.355.485	1	1.335.355.485	1	1.335.355.485		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	10		12		20		15		15			
2.13.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				685.467.800		685.467.800		685.467.800		685.467.800		685.467.800		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	10	685.467.800	12	685.467.800	20	685.467.800	15	685.467.800	15	685.467.800		
2.13.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				648.697.800		723.697.800		649.887.685		649.887.685		649.887.685		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	648.697.800	1	723.697.800	1	649.887.685	1	649.887.685	1	649.887.685		
2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				424.779.119		424.779.119		137.639.119		137.639.119		235.988.909		
Meningkatnya kualitas barang milik daerah (BMD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	424.779.119	1	424.779.119	1	137.639.119	1	137.639.119	1	235.988.909		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	13	30		30		30		30		30			

	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	9		9		10		10		10			
2.13.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				99.944.000		99.944.000		99.944.000		99.944.000		99.944.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	9	99.944.000	9	99.944.000	10	99.944.000	10	99.944.000	10	99.944.000		
2.13.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				37.695.119		37.695.119		37.695.119		37.695.119		37.695.119		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	13	30	37.695.119	30	37.695.119	30	37.695.119	30	37.695.119	30	37.695.119		
2.13.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				287.140.000		287.140.000		0		0		98.349.790		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	287.140.000	1	287.140.000	1	0	1	0	1	98.349.790		
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA				151.159.550		151.159.550		352.061.100		192.061.100		192.061.100		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan (%)	0	100	151.159.550	100	151.159.550	100	352.061.100	100	192.061.100	100	192.061.100	2.13.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa				151.159.550		151.159.550		352.061.100		192.061.100		192.061.100		
Meningkatnya pengelolaan wilayah desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	0	35	151.159.550	23	151.159.550	23	352.061.100	23	192.061.100	22	192.061.100		
	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	126	126		126		126		126		126			
	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	126	1		1		1		1		1			
2.13.02.2.01.0002 - Fasilitas Tata Wilayah Desa				58.061.100		58.061.100		58.061.100		58.061.100		58.061.100		
Terlaksananya Fasilitas Penataan Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	126	1	58.061.100	1	58.061.100	1	58.061.100	1	58.061.100	1	58.061.100		

2.13.02.2.01.0003 - Fasilitas Penataan Kewenangan Desa				33.098.450		33.098.450		34.000.000		34.000.000		34.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	126	126	33.098.450	126	33.098.450	126	34.000.000	126	34.000.000	126	34.000.000		
2.13.02.2.01.0006 - Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa				60.000.000		60.000.000		260.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	0	35	60.000.000	23	60.000.000	23	260.000.000	23	100.000.000	22	100.000.000		
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				16.713.258.300		18.513.258.300		20.120.315.000		21.410.315.000		22.510.315.000		
Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	Persentase lembaga desa yang berprestasi (%)	10,3	73,8	14.500.000.000	74	16.300.000.000	74,9	17.800.000.000	75	19.300.000.000	75,9	20.200.000.000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.03.2.01 - Fasilitas Kerja Sama antar Desa				16.713.258.300		18.513.258.300		20.120.315.000		21.410.315.000		22.510.315.000		
Meningkatnya kerjasama badan kerjasama antar desa dengan pihak ketiga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	7	1	14.500.000.000	1	16.300.000.000	1	17.800.000.000	1	19.300.000.000	1	20.200.000.000		
2.13.03.2.01.0003 - Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan				14.500.000.000		16.300.000.000		17.800.000.000		19.300.000.000		20.200.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	7	1	14.500.000.000	1	16.300.000.000	1	17.800.000.000	1	19.300.000.000	1	20.200.000.000		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan (%)	0	100	2.213.258.300	100	2.213.258.300	100	2.320.315.000	100	2.110.315.000	100	2.310.315.000		
2.13.03.2.01 - Fasilitas Kerja Sama antar Desa				16.713.258.300		18.513.258.300		20.120.315.000		21.410.315.000		22.510.315.000		
Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	4	2.213.258.300	4	2.213.258.300	4	2.320.315.000	4	2.110.315.000	4	2.310.315.000		
	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
2.13.03.2.01.0001 - Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				27.943.300		27.943.300		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	4	27.943.300	4	27.943.300	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000		
2.13.03.2.01.0002 - Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				2.185.315.000		2.185.315.000		2.285.315.000		2.075.315.000		2.275.315.000		

Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	4	2.185.315.000	4	2.185.315.000	4	2.285.315.000	4	2.075.315.000	4	2.275.315.000		
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				4.246.661.550		4.246.661.550		4.438.703.300		4.358.703.300		4.758.703.300		
Meningkatnya Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa	Persentase Perkembangan Status BUMDes Maju (%)	5	6	611.079.400	7	611.079.400	8	611.079.400	9	661.079.400	10	761.079.400	2.13.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				4.246.661.550		4.246.661.550		4.438.703.300		4.358.703.300		4.758.703.300		
Meningkatnya BUMDES dan BUMDESMA yang menghasilkan PADes	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	1	1	611.079.400	1	611.079.400	1	611.079.400	1	661.079.400	1	761.079.400		
2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				611.079.400		611.079.400		611.079.400		661.079.400		761.079.400		
Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	1	1	611.079.400	1	611.079.400	1	611.079.400	1	661.079.400	1	761.079.400		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan (%)	0	100	3.635.582.150	100	3.635.582.150	100	3.827.623.900	100	3.697.623.900	100	3.997.623.900		
2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				4.246.661.550		4.246.661.550		4.438.703.300		4.358.703.300		4.758.703.300		
Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	1	126	3.200.914.200	126	3.217.843.400	126	3.365.914.200	126	3.235.914.200	126	3.360.914.200		
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	0	126		126		126		126		126			
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	1	39		0		27		0		60			
	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)	0	126		126		126		126		126			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	1	126		126		126		126		126			
	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	126		126		126		126		126			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	1	126		126		126		126		126			
	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	126	126		126		126		126		126			
	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	126	126		126		126		126		126			
	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	0	126		126		126		126		126			
2.13.04.2.01.0001 - Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				70.934.100		70.934.100		170.934.100		70.934.100		120.934.100		
Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	126	70.934.100	126	70.934.100	126	170.934.100	126	70.934.100	126	120.934.100		
2.13.04.2.01.0002 - Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa				106.322.600		106.322.600		106.322.600		106.322.600		106.322.600		
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	1	126	106.322.600	126	106.322.600	126	106.322.600	126	106.322.600	126	106.322.600		
2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				99.504.200		1.380.866.630		124.504.200		1.384.902.030		174.504.200		
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	126	126	99.504.200	126	1.380.866.630	126	124.504.200	126	1.384.902.030	126	174.504.200		
2.13.04.2.01.0006 - Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa				20.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)	0	126	20.000.000	126	20.000.000	126	25.000.000	126	25.000.000	126	25.000.000		
2.13.04.2.01.0007 - Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				29.880.400		29.880.400		29.880.400		29.880.400		29.880.400		
Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	0	126	29.880.400	126	29.880.400	126	29.880.400	126	29.880.400	126	29.880.400		
2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				2.545.795.660		0		2.545.795.660		0		2.545.795.660		
Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	1	39	2.545.795.660	0	0	27	2.545.795.660	0	0	60	2.545.795.660		

2.13.04.2.01.0010 - Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				18.468.200		18.468.200		18.468.200		18.468.200		18.468.200		
Terlaksananya Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	1	1	18.468.200	1	18.468.200	1	18.468.200	1	18.468.200	1	18.468.200		
2.13.04.2.01.0011 - Fasilitas Penyusunan Profil Desa				79.046.700		79.046.700		79.046.700		79.046.700		79.046.700		
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	1	126	79.046.700	126	79.046.700	126	79.046.700	126	79.046.700	126	79.046.700		
2.13.04.2.01.0012 - Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa				30.000.000		30.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	0	126	30.000.000	126	30.000.000	126	35.000.000	126	35.000.000	126	35.000.000		
2.13.04.2.01.0014 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				90.268.700		1.371.631.130		90.268.700		1.375.666.530		115.268.700		
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	126	126	90.268.700	126	1.371.631.130	126	90.268.700	126	1.375.666.530	126	115.268.700		
2.13.04.2.01.0016 - Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa				36.275.440		36.275.440		36.275.440		36.275.440		36.275.440		
Terlaksananya Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	1	126	36.275.440	126	36.275.440	126	36.275.440	126	36.275.440	126	36.275.440		
2.13.04.2.01.0018 - Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				74.418.200		74.418.200		104.418.200		74.418.200		74.418.200		
Terlaksananya Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	1	2	74.418.200	2	74.418.200	2	104.418.200	2	74.418.200	2	74.418.200		
Meningkatnya pengelolaan tata kelola keuangan desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	126	361.989.550	126	361.989.550	126	405.960.500	126	405.960.500	126	580.960.500		
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	1	126		126		126		126		126			
2.13.04.2.01.0003 - Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				104.678.700		104.678.700		148.649.650		148.649.650		223.649.650		
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	126	104.678.700	126	104.678.700	126	148.649.650	126	148.649.650	126	223.649.650		

2.13.04.2.01.0004 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa				257.310.850		257.310.850		257.310.850		257.310.850		357.310.850		
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	1	126	257.310.850	126	257.310.850	126	257.310.850	126	257.310.850	126	357.310.850		
Meningkatnya pengelolaan wilayah desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)	50	126	16.929.200	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.13.04.2.01.0015 - Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa				16.929.200		0		0		0		0		
Terlaksananya Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)	50	126	16.929.200	0	0	0	0		0		0		
Meningkatnya tata kelola aset desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	1	126	55.749.200	126	55.749.200	126	55.749.200	126	55.749.200	126	55.749.200		
2.13.04.2.01.0013 - Fasilitas Pengelolaan Aset Desa				55.749.200		55.749.200		55.749.200		55.749.200		55.749.200		
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	1	126	55.749.200	126	55.749.200	126	55.749.200	126	55.749.200	126	55.749.200		
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				1.550.561.323		1.588.920.600		1.588.920.600		1.738.920.600		1.938.920.600		
Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	Persentase lembaga desa yang berprestasi (%)	10,3	73,8	661.640.723	74	700.000.000	74,9	700.000.000	75	700.000.000	75,9	800.000.000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.550.561.323		1.588.920.600		1.588.920.600		1.738.920.600		1.938.920.600		
meningkatkan semangat kebersamaan ke gotong royongan dan ke swadayaan masyarakat dalam mendukung program pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	0	1	113.227.150	1	129.586.427	1	129.586.427	1	129.586.427	1	129.586.427		
2.13.05.2.01.0007 - Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				113.227.150		129.586.427		129.586.427		129.586.427		129.586.427		

Terlaksananya Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	0	1	113.227.150	1	129.586.427	1	129.586.427	1	129.586.427	1	129.586.427		
Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	5	5	322.474.052	5	334.474.052	5	334.474.052	5	334.474.052	5	434.474.052		
2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				322.474.052		334.474.052		334.474.052		334.474.052		434.474.052		
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	5	5	322.474.052	5	334.474.052	5	334.474.052	5	334.474.052	5	434.474.052		
Terlaksananya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	1	1	225.939.521	1	235.939.521	1	235.939.521	1	235.939.521	1	235.939.521		
2.13.05.2.01.0002 - Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				225.939.521		235.939.521		235.939.521		235.939.521		235.939.521		

Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	1	1	225.939.521	1	235.939.521	1	235.939.521	1	235.939.521	1	235.939.521		
Meningkatnya Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa	Persentase Perkembangan Status BUMDes Maju (%)	5	6	888.920.600	7	888.920.600	8	888.920.600	9	1.038.920.600	10	1.138.920.600		
2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.550.561.323		1.588.920.600		1.588.920.600		1.738.920.600		1.938.920.600		
Meningkatnya BUMDES dan BUMDESMA yang menghasilkan PADes	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	1	1	388.920.550	1	388.920.550	1	388.920.550	1	488.920.550	1	488.920.550		
2.13.05.2.01.0005 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				388.920.550		388.920.550		388.920.550		488.920.550		488.920.550		
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	1	1	388.920.550	1	388.920.550	1	388.920.550	1	488.920.550	1	488.920.550		
Meningkatnya Inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	4	500.000.050	4	500.000.050	4	500.000.050	4	550.000.050	4	650.000.050		
2.13.05.2.01.0006 - Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				500.000.050		500.000.050		500.000.050		550.000.050		650.000.050		
Terlaksananya Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	4	500.000.050	4	500.000.050	4	500.000.050	4	550.000.050	4	650.000.050		

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Desa	Poin	0	490	493,2	496,4	499,6	502,8	506	
II	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Nilai SAKIP	poin	71	72,95	74,90	76,85	78,80	80,75	82,70	
III	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase Desa Mandiri	%	59,52	38,09	41,27	44,44	47,62	50,79	53,97	
2	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100	100	100	100	100	100	100	

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1.	2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	
			2.13.02.2.01.0002 - Fasilitasi Tata Wilayah Desa	
			2.13.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	
			2.13.02.2.01.0006 - Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	
2.	2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	
		Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	2.13.03.2.01.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	
			2.13.03.2.01.0002 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	2.13.03.2.01.0003 - Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	
3.	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
		Meningkatnya Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0001 - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			2.13.04.2.01.0002 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	
			2.13.04.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	

			2.13.04.2.01.0004 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	
			2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
			2.13.04.2.01.0006 - Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	
			2.13.04.2.01.0007 - Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	
		Meningkatnya Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa	2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	
			2.13.04.2.01.0010 - Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
			2.13.04.2.01.0011 - Fasilitas Penyusunan Profil Desa	
			2.13.04.2.01.0012 - Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	
			2.13.04.2.01.0013 - Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	
			2.13.04.2.01.0014 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	
			2.13.04.2.01.0015 - Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
			2.13.04.2.01.0016 - Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa	
			2.13.04.2.01.0018 - Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
4.	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.13.05.2.01.0002 - Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	

			2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
		Meningkatnya Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa	2.13.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
			2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
		Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	2.13.05.2.01.0007 - Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGA N
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
2.	Nilai SAKIP	poin	71	72,95	74,90	76,85	78,80	80,75	82,70	
3.	Indeks Desa	Poin	0	490	493,2	496,4	499,6	502,8	506	
4.	Persentase Desa Mandiri	%	59,52	38,09	41,27	44,44	47,62	50,79	53,97	
5.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	77,05	80,05	81	81,5	82	82,5	83	
6.	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Poin	65,91	80	80,5	81	81,5	82	82,5	

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
2.	Persentase Desa Mandiri	positif	%	59,52	38,09	41,27	44,44	47,62	50,79	53,97	
3.	Persentase pengentasan desa tertinggal	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	